



“

MEMBUMIKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
KINERJA. – IR. DR. PENNY K. LUKITO, MCP

”

LAPORAN KINERJA

BALAI POM DI MAMUJU TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan karunia-Nya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dapat menyelesaikan tugas-tugas selama tahun 2019 dengan baik dan tepat waktu yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *input*, *output*, dan *outcome*, yang telah ditetapkan dan direalisasikan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh realisasi kinerja dan pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja oleh Balai POM di Mamuju dalam melaksanakan tugas dan wewenanginya selama tahun 2019. Selama tahun 2019 Balai POM di Mamuju telah menyelesaikan tugas pokok dan fungsi melalui berbagai kegiatan di dalam upaya memenuhi Visinya "*Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa*".

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2019, diharapkan akan memberikan informasi atas kinerja yang telah tercapai dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb



Mamuju, 26 Februari 2020
Kepala Balai POM di Mamuju,

Dra. Nefti Nurmuliauwaty, Apt., M.Kes.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
I PENDAHULUAN	2
1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	3
1.3. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	4
1.4. ISU STRATEGIS & PERMASALAHAN UTAMA	6
1.5. STRUKTUR ORGANISASI	9
II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. RENCANA STRATEGIS	12
2.2. PERJANJIAN KINERJA	35
III AKUNTABILITAS KINERJA	41
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	41
3.2. REALISASI ANGGARAN	74
3.3. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	79
IV PENUTUP	86
4.1. KESIMPULAN	86
4.2. SARAN	87
LAMPIRAN	88

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Peta Provinsi Sulawesi Barat
- Gambar 2. Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi dan dampaknya
- Gambar 3. Struktur Organisasi BPOM di Mamuju
- Gambar 4. Transformasi BPOM sebagai Koordinator Pengawasan Obat dan Makanan
- Gambar 5. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan
- Gambar 6. Peta Strategi Level II BB/BPOM
- Gambar 7. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Balai POM di Mamuju periode 2017-2019
- Gambar 8. Perbandingan Capaian Kinerja Antara Tahun 2018 dan 2019
- Gambar 9. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Balai POM Pembanding
- Gambar 10. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- Gambar 10. Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju
- Gambar 11. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju
- Gambar 12. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju
- Gambar 13. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju
- Gambar 14. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju
- Gambar 15. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju
- Gambar 16. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB/BPOM Mamuju
- Gambar 17. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju
- Gambar 18. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar
- Gambar 19. Jumlah Komoditi yang di sampling.
- Gambar 20. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Mamuju
- Gambar 21. Presentase Sarana Distribusi Obat yang diperiksa
- Gambar 22. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BPOM di Mamuju
- Gambar 23. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Mamuju
- Gambar 25. Persentase Realisasi Anggaran
- Gambar 26. Pencapaian Kinerja Balai POM di Mamuju (Aplikasi SMART DJA)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2019
Tabel 2.	Kerangka Penandaan Kegiatan 2019
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Tabel 4.	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja
Tabel 5.	Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2019
Tabel 5.	Target dan Realisasi tahun 2019
Tabel 6.	Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2019
Tabel 7.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019
Tabel 8.	Perbandingan Capaian Kinerja Antara Tahun 2018 dan Tahun 2019
Tabel 9.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Balai POM Pembanding
Tabel 10.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 BPOM di Mamuju Tahun 2019
Tabel 9.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 BPOM di Mamuju Tahun 2019
Tabel 10.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 BPOM di Mamuju Tahun 2019
Tabel 11.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 BPOM di Mamuju Tahun 2019
Tabel 12.	Data Sarana dan Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
Tabel 13.	Data Sarana dan Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat Diwilayah Sulawesi Barat Tahun 2018
Tabel 14.	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Oleh Balai POM di Mamuju
Tabel 15.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5 BPOM di Mamuju Tahun 2019
Tabel 16.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6 BPOM di Mamuju Tahun 2018
Tabel 17.	Target, Realisasi dan Capaian Anggaran per Sasaran Kegiatan
Tabel 18.	Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Indikator Kinerja
Tabel 19.	Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Sasaran Kegiatan
Tabel 20.	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja pada hakekatnya merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang menjabarkan Visi dan Misi organisasi ke dalam tujuan dan sasaran strategis/program/kegiatan Balai POM di Mamuju. Tujuan dan sasaran ini dapat dicapai dengan melaksanakan suatu kerja yang dinyatakan dalam berbagai kegiatan. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut diperlukan anggaran sebagai input kegiatan. Balai POM di Mamuju mendapatkan total anggaran DIPA tahun 2019 sebesar Rp. 17.035.554.000,-, realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 16.514.582.388,- atau 96.94%. Terjadi kenaikan realisasi anggaran tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 83.41% dengan presentase kenaikan sebesar 13.53%.

Adapun capaian Sasaran Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. *"Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat"* persentase capaian masing-masing Indikator Kinerja yaitu:
 - a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 73.03%
 - b. Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat adalah 96.17%
 - c. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat adalah 78.32%
 - d. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat adalah 106.10%

- e. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat adalah 87.85%
 - f. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat adalah 98.04%
2. *"Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju"* dengan Indikator:
- a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju adalah 111.54%
 - b. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Mamuju adalah 100.00%
3. *"Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju"* persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 107.43%
4. *"Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat"* persentase capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu:
- a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat adalah 100.00%
 - b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 73.89%
 - c. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 50.00%
 - d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat adalah 117.65%
 - e. Rasio tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 74.07%
5. *"Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju"* persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

5 yaitu Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 50.00%.

6. *"Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2017-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju"* persentase capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6 yaitu Nilai AKIP Balai POM di Mamuju adalah 86.57%.

Balai POM di Mamuju telah berhasil mencapai target 2 Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria BAIK yaitu Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju, dan Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Mamuju. Hal ini menunjukkan keberhasilan Balai POM di Mamuju dalam memberdayakan masyarakat baik masyarakat pada umumnya maupun pelaku usaha di bidang obat dan makanan; sesuai dengan salah satu misi BPOM yaitu mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

Berdasarkan perhitungan efisiensi sasaran kegiatan, dari 6 (enam) sasaran terdapat 5 (lima) sasaran yang efisien dan 1 (satu) sasaran yang tidak efisien. Efisiensi paling tinggi terdapat pada Sasaran Kegiatan ke dua yaitu *"Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju"*, sedangkan efisiensi paling rendah terdapat pada sasaran ke lima yaitu *"Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju."*

Balai POM di Mamuju senantiasa berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Adapun keberhasilan yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai di Lingkungan Balai POM di Mamuju yang telah mengimplementasikan sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja, diantaranya:

1. Sistem Pengawasan berbasis risiko yang dilaksanakan secara profesional dan kredibel oleh Balai POM di Mamuju untuk melindungi masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Budaya Kerjasama tim yang tercipta di Balai POM di Mamuju, sehingga dalam mencapai target dapat dilaksanakan seoptimal mungkin oleh semua bagian.
3. Balai POM di Mamuju senantiasa meningkatkan pemahaman konsumen dan produsen/distributor Obat dan Makanan melalui penyampaian Informasi secara langsung maupun melalui sosial media.
4. SDM Balai POM di Mamuju dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh Integritas dan professional; dan selalu berusaha menghindari konflik kepentingan maupun gratifikasi yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Koordinasi dan hubungan kerja sama dengan lintas sektor terkait cukup baik.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada pasal 3 disebutkan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan Prinsip-Prinsip Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan Kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi dan Efektifitas serta Profesionalisme. Hal ini menunjukkan tekad Bangsa Indonesia untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan instrument pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. LAPKIN merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam LAPKIN, dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja), dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil penelitian dan pengamatan kondisi nyata yang terdapat di masyarakat.

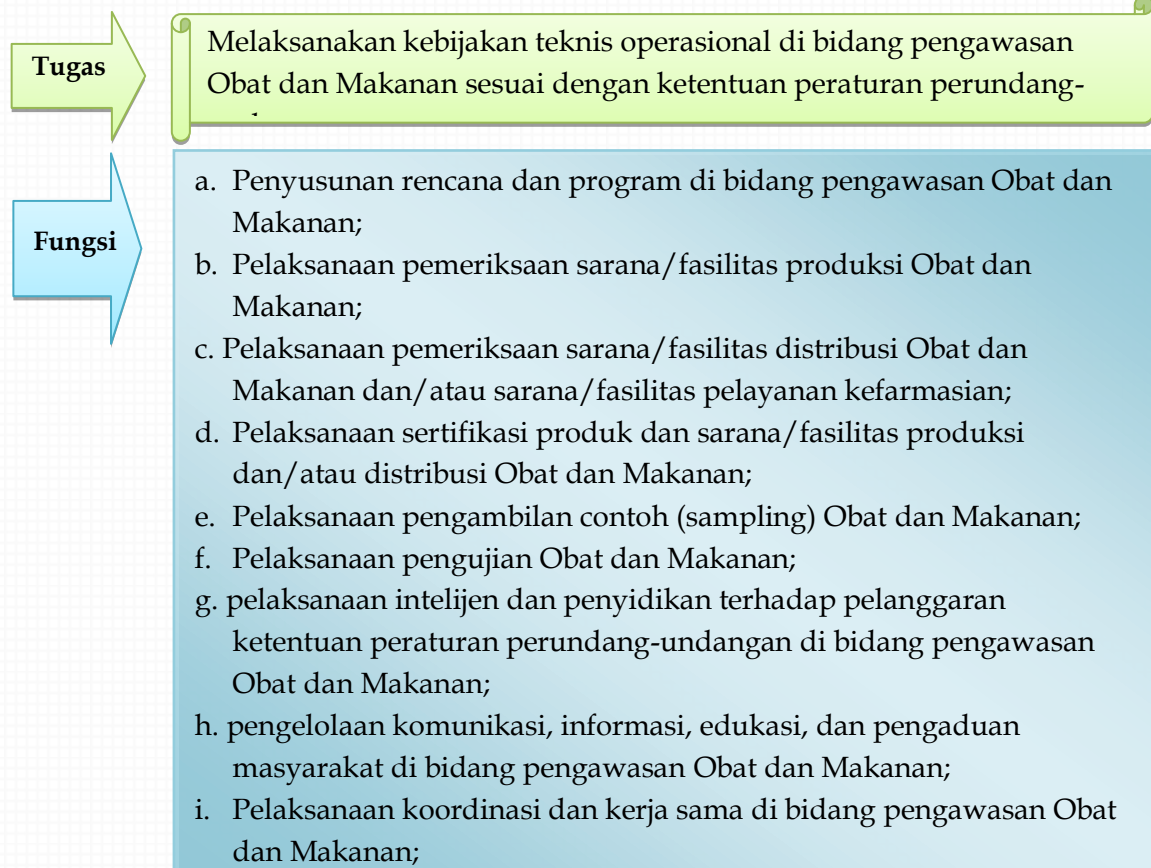
Laporan Kinerja disusun dengan tujuan untuk mendata dan mengevaluasi hasil kerja dari instansi pemerintah dalam 1 (satu) tahun, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kerja tahun berikutnya, sehingga instansi pemerintah tersebut mampu eksis dan unggul

diera perubahan global yang cepat dan dalam tingkat persaingan yang semakin ketat di lingkungan sebagaimana kondisi saat ini. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perbaikan diberbagai bidang berdasarkan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang akan dicapai demi kesejahteraan masyarakat.

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai POM di Mamuju adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT Badan POM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Balai POM di Mamuju mempunyai **tugas** dan **fungsi** sebagai berikut :



1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Balai POM di Mamuju sebagai bagian integral dari Badan POM RI dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Peran dan fungsi Badan POM yang sangat penting dan strategis dalam mendorong tercapainya agenda prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019, ditetapkan pokok-pokok kegiatan strategi yang di fokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, sebagai berikut:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebelum beredar (*pre-market*)
2. Pengawasan obat dan makanan *pasca* beredar di masyarakat (*post-market*)
3. Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan pusat dan balai.

Berdasarkan hal tersebut, Balai POM di Mamuju sebagai unit pengawas obat dan makanan di Mamuju perlu melakukan penguatan, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia sehingga kinerja dimasa mendatang semakin optimal dan memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan makanan yang lebih baik dalam koridor hukum dalam menjaga keamanan mutu serta manfaat obat dan makanan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat Sulawesi Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk

tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Mamuju sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama, dan tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Balai POM di Mamuju perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, Distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Balai POM di Mamuju.

1.3 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

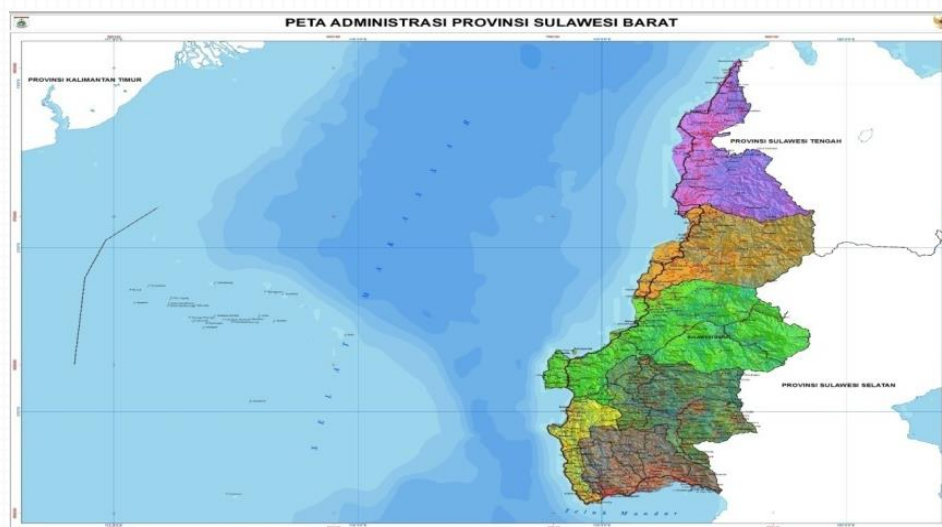
Sejak tahun 2017 Balai POM di Mamuju telah menjadi satker mandiri dengan DIPA sendiri dan dalam melaksanakan operasional kegiatan masih

memanfaatkan Gedung kantor dengan status sewa/kontrak yang berkedudukan di Jl. Ratulangi No 4 kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, pada periode pelaporan Balai POM di Mamuju telah mempunyai Aset berupa Tanah seluas 9.109 M² di Jalan Poros Kalukku Desa Bambu yang merupakan transfer masuk dari Balai Besar POM di Makassar yang perolehan sebelumnya dari Hibah Pemda Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014 dan telah balik nama an. Badan POM dengan status sertifikat nomor 027 pada tahun 2016.

Pada periode pelaporan diatas tanah tersebut Balai POM di Mamuju telah merealisasikan pembangunan tahap 1 (satu) yaitu pembangunan 3 Gedung Laboratorium (Laboratorium Teranakoko, Laboratorium Pangan dan Laboratorium Mikrobiologi) dan rencana kedepannya akan dilanjutkan untuk pembangunan Tahap 2 yaitu Gedung Kantor dan Gedung Layanan Publik. Tahap ke-3 adalah pembangunan sarana dan prasarana lingkungan lainnya.

Meskipun Balai POM di Mamuju telah memiliki 3 (tiga) Gedung Laboratorium pada Tahun 2019, namun pengujian masih dilakukan di Balai Besar POM di Makassar karena sarana dan prasarana pendukung belum memungkinkan untuk dilakukan pengujian.

Letak Geografis



Gambar 1. Peta Provinsi Sulawesi Barat

Batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

- Sebelah Utara : Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur : Sulawesi Selatan
- Sebelah Selatan : Sulawesi Selatan
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.937.16 km persegi. Secara administratif Provinsi Sulawesi Barat terbagi menjadi 6 (Enam) Kabupaten, yaitu Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, terdiri dari 69 Kecamatan dan 649 Desa/Kelurahan. Letak geografis Provinsi Sulawesi Barat yang berada di antara Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Selat Makassar yang berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan, menjadikannya sebagai salah satu tujuan dari aktivitas perdagangan obat dan makanan di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi ini menjadi poin penting bagi Balai POM di Mamuju untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.

Beberapa aspek penting yang menjadi *concern* pengawasan Balai POM di Mamuju antara lain :

- Jalur perdagangan obat dan makanan di Wilayah Indonesia Timur;
- Komoditi yang banyak beredar di Sulawesi Barat berdasarkan jumlah dan nilai adalah Kosmetika yang Tidak Memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya;
- Obat tertentu yang sudah dibatalkan izin edarnya masih ditemukan beredar Sulawesi Barat;
- Sulawesi Barat merupakan daerah penghasil produk perikanan dan perkebunan khususnya produk kakao dan minyak sawit sehingga diperlukan pengawasan sebelum diolah dengan bersinergi bersama SKPD terkait.

1.4 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Perubahan dinamis pada lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Mamuju. Lingkungan strategis dengan berbagai *issu* strategisnya banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju, dan mengawali kinerja tahun 2017, Balai POM di Mamuju menyusun kegiatan strategis terhadap berbagai *issu* yang ada sebagaimana digambarkan pada diagram dibawah ini :



Gambar 2.

Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Saat Ini Dan Dampaknya

Pelaksanaan peran dan fungsi Balai POM di Mamuju tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain:

1. Proses distribusi produk yang semakin mudah ke Wilayah Sulawesi Barat termasuk di dalamnya adalah produk ilegal;

2. Adanya pelabuhan-pelabuhan kecil yang belum dapat dikawal secara intensif oleh Balai POM di Mamuju;
3. Semakin banyak produsen peracik kosmetika rumahan yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya;
4. Maraknya perdagangan Obat, Makanan, Kosmetika dan Obat Tradisional yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya secara *Online*;
5. Karena tidak adanya Pedagang Besar Farmasi di Wilayah Sulawesi Barat, kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendistribusikan obat dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dilakukan dengan menggunakan mobil kanvas tanpa disertai dokumen pengiriman obat;
6. Peredaran Obat Tertentu (OOT) dan penyalahgunaan obat semakin marak terjadi, distribusi OOT tersebut dilakukan oleh orang perorangan, bukan oleh sarana yang berhak;
7. Balai POM di Mamuju saat ini sudah mempunyai laboratorium pengujian, namun belum dapat berfungsi optimal karena keterbatasan peralatan laboratorium sehingga pengujian laboratorium terhadap sampel masih dilakukan di Balai POM di Makassar.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi fungsi Balai POM di Mamuju dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal.

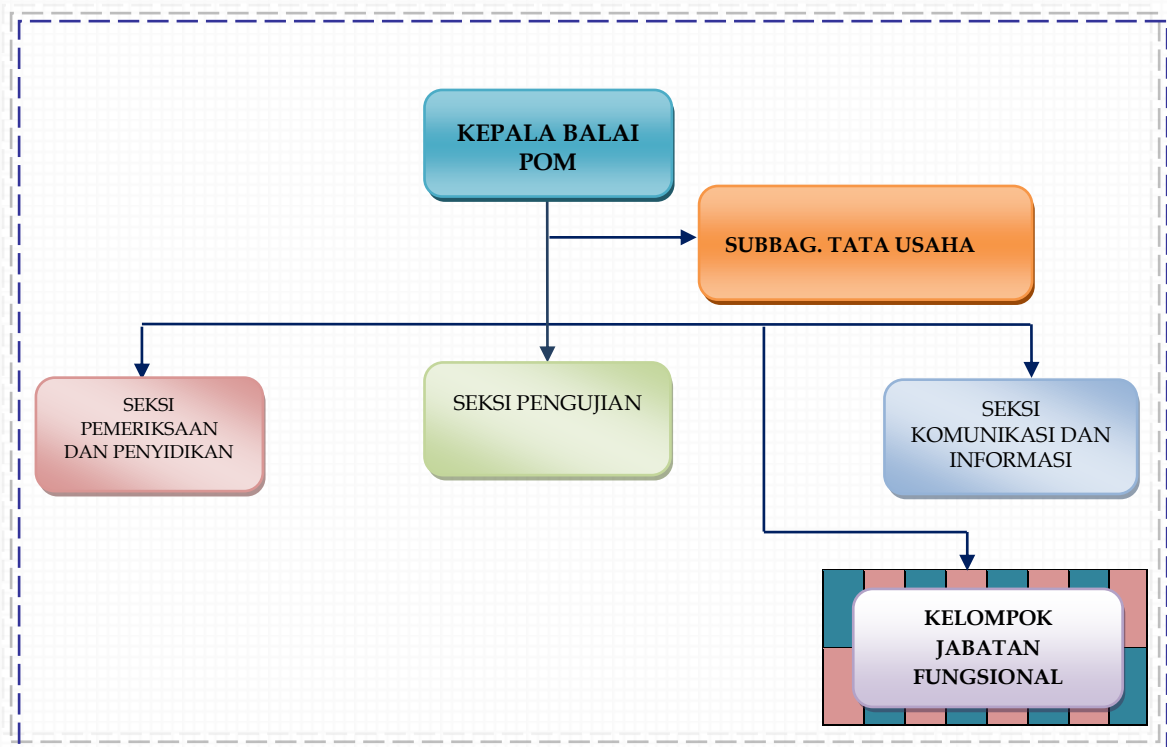
Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Balai POM di Mamuju sebagai Institusi Pengawas Obat dan Makanan di Sulawesi Barat masih perlu terus dilakukan perbaikan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya, agar pencapaian kinerja di masa datang dapat lebih optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat yang lebih ketat dan baik dalam menjaga keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1. di bawah ini, secara garis besar unit-unit kerja Balai POM di Mamuju dapat dikelompokkan sebagai berikut: Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan, Seksi Pengujian dan Seksi Komunikasi dan Informasi serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi Balai POM di Mamuju

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai POM di Mamuju didukung Struktur Organisasi, yang terdiri dari 3 Seksi dan 1 Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional, yang melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

2. Seksi Pengujian

Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

3. Seksi Pemeriksaan dan Penindakan

Seksi Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan, serta intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. Seksi Informasi dan Komunikasi

Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

II. PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Balai POM di Mamuju mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2017-2019. Rencana strategis BPOM di Mamuju yang telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019 akan dijelaskan dalam rencana kinerja (*performance plan*) 2019.

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Balai POM di Mamuju. Perencanaan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Balai POM di Mamuju dalam satu tahun tertentu, dan melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen Balai POM di Mamuju sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber data yang tersedia.

Revisi Renstra Balai POM di Mamuju Tahun 2019 mengacu OTK baru merupakan amanat tindak lanjut dari Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, dimana pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2015-2019 berjalan, dapat dilakukan sepanjang: (1) terdapat undang-undang yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Perubahan pendekatan manajemen kinerja juga terjadi pada Revisi Renstra BPOM ini, yang semula *Logical Framework* menjadi *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa

yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Balai POM di Mamuju sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Tekhnis dari Badan POM di Daerah dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, kemanfaatan/ khasiat obat dan makanan tersebut sesuai standar yang telah ditetapkan diwilayah Propinsi Sulawesi Barat, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Filosofis Badan POM yaitu :

“BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan melaksanakan tugasnya secara independen, efektif, dan terintegrasi dengan sektor terkait lainnya, untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan melalui penetapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan; penataan dan pembinaan kepatuhan pelaku usaha, serta pengendalian dan penindakan atas berbagai bentuk pelanggaran; yang diperkuat dengan partisipasi masyarakat”.

Untuk dapat memenuhi peran dan fungsi Badan POM di daerah sebagaimana harapan dalam definisi filosofis tersebut memerlukan konsekuensi perubahan dalam beberapa hal. Dalam arti lain diperlukan sebuah transformasi bagi Badan POM yang selanjutnya juga harus diikuti dengan berbagai perubahan yang menyertainya.



1. Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara terfragmentasi; 2. Keterbatasan akses pengawasan pada fasyankes, pelaku usaha kefarmasian dan makanan; 3. Tugas dan fungsi UPT terbatas; 4. Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas UPT; 5. Orientasi kinerja terbatas pada output.	1. BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara <i>full spectrum</i>; 2. Memiliki akses pengawasan pada fasyankes, pelaku usaha kefarmasian dan makanan 3. Penguatan UPT; 4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT - >people, process, infrastructure; 5. Orientasi kinerja pada <i>outcome</i> dan <i>impact</i>; 6. Penguatan penindakan dengan efek jera.
--	---

Gambar 4.
Transformasi BPOM sebagai Koordinator Pengawasan Obat dan Makanan

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran yang harus dilaksanakan oleh Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia termasuk Balai POM di Mamuju'

VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber

daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019, maka Badan POM telah menetapkan Visi BPOM 2015-2019 yaitu: *"Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa"*.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

Aman ____: Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional,

sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko Untuk Melindungi Masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Sulawesi Barat khususnya merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup perkuatan standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan produk Obat dan Makanan memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, diharapkan Balai POM di Mamuju mampu melindungi masyarakat dengan optimal di Wilayah Propinsi Sulawesi Barat, Menyadari kompleksnya tugas yang diemban, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Mamuju akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Mamuju mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Mamuju perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis, antara lain pada pengawasan sarana dan produk Obat dan Makanan yang ada di wilayah Propinsi Sulawesi Barat.

2. Mendorong Kapasitas Dan Komitmen Pelaku Usaha Dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat Dan Makanan Serta Memperkuat Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis. Pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sebagai lembaga pengawas, Balai POM di Mamuju harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di Masyarakat.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Balai POM di Mamuju melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Wilayah Propinsi Sulawesi Barat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai POM di Mamuju tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar

terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar 7 dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 5. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Badan POM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut Balai POM di Mamuju harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, Balai POM di Mamuju sebagai UPT Badan POM di Daerah yang merupakan suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana

(*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Misi Badan POM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan POM yang harus dilaksanakan oleh seluruh UPT yang tersebar diseluruh Wilayah Indonesia. Pengawasan pre- dan post-market yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat Badan POM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Balai POM di Mamuju mampu melindungi masyarakat di Wilayah Propinsi Sulawesi Barat dengan optimal

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*). Untuk mendukung itu, maka Balai POM di Mamuju perlu memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*).

BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Balai POM di Mamuju menjadi semangat bagi seluruh anggota Balai POM di Mamuju dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

TUJUAN

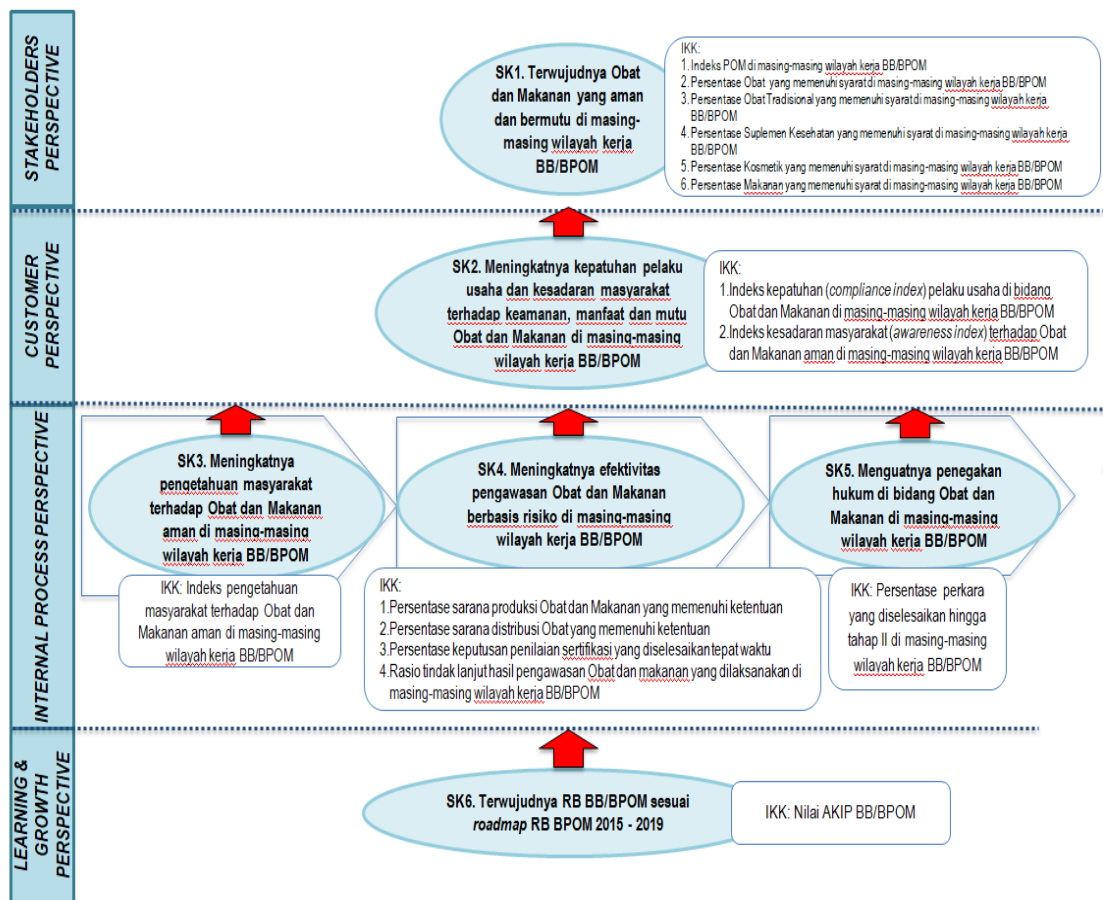
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2017-2019 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (2) Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Mamuju dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Mamuju. Dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun (2017-2019) ke depan diharapkan Balai POM di Mamuju akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 2 Balai Besar/Balai POM berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR/ BALAI POM



Gambar 6. Peta Strategi Level II BB/BPOM

SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Mamuju tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Mamuju merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, penguatan standardisasi yang merupakan fungsi penguatan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan dengan membentuk TIM terpadu dan Perjanjian Kerjasama dengan Lintas Sektor terkait implementasi Inpres No 03 Tahun 2017. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, Pengawasan sebelum beredar (*pre-market*) dalam hal ini pre market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu tidak termasuk penyusunan standard. Untuk Izin MD Penilaian dilakukan terpusat dan didaftar secara online oleh konsumen akan tetapi rekomendasi terkait penilaian sarana dilakukan oleh Balai POM di Mamuju untuk wilayah Propinsi Sulawesi Barat dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional sedangkan produk PIRT rekomendasi penilaian sarana dilakukan oleh Balai POM di Mamuju dan Izin edarnya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan

projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Mamuju, maka indikatornya adalah :

- a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target **71** pada akhir tahun 2019
- b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target **94%** pada akhir tahun 2019
- c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target **84%** pada akhir tahun 2019
- d. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target **87%** pada akhir tahun 2019
- e. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target **93%** pada akhir tahun 2019
- f. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target **80%** pada akhir tahun 2019

SK2. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan

pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, Balai POM di Mamuju bertugas melaksanakan kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Mamuju melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 61 pada akhir 2019

- b. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 66 pada akhir 2019

SK3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BPOM perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BPOM perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 61% pada akhir 2019.

SK4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan

bermutu, diharapkan Balai POM di Mamuju mampu melindungi masyarakat dengan optimal di wilayah Propinsi Sulawesi Barat. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Mamuju, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Mamuju akan meningkatkan efektivitasnya apabila Balai POM di Mamuju mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Mamuju perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya adalah

1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat, dengan target **100%** pada akhir 2019
2. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diwilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target **42%** pada akhir 2019
3. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan diwilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target **50%** pada akhir 2019
4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target **85%** pada akhir 2019.
5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan, dengan target **60%** pada akhir 2019.

SK5. Menguatnya penegakan hukum di bidang obat dan makanan diwilayah kerja Balai POM di Mamuju

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Mamuju melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya sebagai adalah Persentase jumlah perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang diselesaikan hingga tahap II dimasing-masing wilayah kerja BB/BPOM, dengan target 50% pada akhir 2019.

SK6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BB/BPOM sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Balai POM di Mamuju berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga

kualitas pelayanan publik Balai POM di Mamuju akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2017-2019, Balai POM di Mamuju berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Mamuju untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

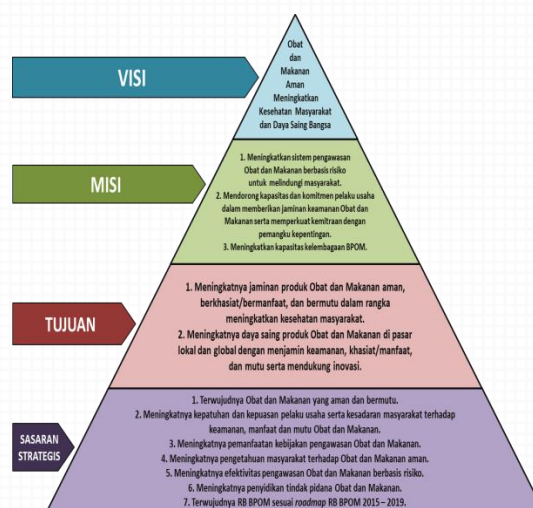
Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Mamuju, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus

sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya Nilai AKIP Balai POM di Mamuju, dengan target **81** pada akhir 2019.

Berikut ini adalah Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai POM di Mamuju periode 2017-2019 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :



Gambar 7. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan Balai POM di Mamuju Periode 2017-2019

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan POM serta mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan (NAWA CITA), dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM menetapkan 6 (enam) Sasaran Kegiatan dengan 16 (Enam Belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja untuk Balai Besar/Balai POM diseluruh Indonesia

Sasaran Kegiatan, indikator dan target kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2018-2019 tergambar dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2018-2019

Sasaran Kegiatan	Indikator	2018	2019
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	70	71
	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	93	94
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	83	84
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	83	87
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	92	93
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	83	80
	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	60	61
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	-	66
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	60	61
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	100	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30	42
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	40	50
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80	85
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	50	60
	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	50	50
	Nilai AKIP BB/BPOM	81	81
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM			
Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019			

Tabel 1 diatas merupakan table Sasaran Kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2018-2019 berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang baru yaitu mengacu Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

KEGIATAN BALAI POM di MAMUJU DALAM MENDUKUNG 6 (ENAM) SASARAN KEGIATAN

1. Pengawasan Sarana Distribusi Obat
2. Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Sarana Distribusi Obat.
3. Inspeksi dan Sertifikasi Sarana Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dalam rangka Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha OT, Kosmetik dan SK.
4. Penilaian Keamanan Pangan.
5. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan/ Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha Pangan Olahan
6. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
7. Surveilen dan Promosi Keamanan Pangan
8. Pemeriksaan secara Laboratorium, yakni Pengujian dan Penilaian mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan Obat dan Makanan
9. Investigasi Awal dan Penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan Makanan
10. Koordinasi Kegiatan Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat
11. Koordinasi Perumusan Renstra
12. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM ASN
13. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
14. Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi

15. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur.

Pengawasan yang dilakukan oleh BB/Balai POM mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung Sasaran Kegiatan Badan POM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan *road map* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019.

Kinerja kegiatan tersebut diatas diukur dengan indikator:

- a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target target 71 pada akhir tahun 2019
- b. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada akhir tahun 2019
- c. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 84% pada akhir tahun 2019
- d. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 87% pada akhir tahun 2019
- e. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 93% pada akhir tahun 2019
- f. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 80% pada akhir tahun 2019
- g. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 61 pada akhir tahun 2019

- h. Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 66 pada akhir tahun 2019
- i. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, dengan target 61 pada akhir tahun 2019
- j. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat, dengan target 100% pada akhir 2019
- k. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 42% pada akhir tahun 2019
- l. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 50% pada akhir tahun 2019
- m. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 85% pada akhir tahun 2019
- n. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM, dengan target 60% pada akhir tahun 2019
- o. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II, dengan target 50% pada akhir tahun 2019
- p. Nilai AKIP Balai POM di Mamuju, dengan target 81 pada akhir tahun 2019

KERANGKA PENDANAAN

Sesuai Target Kinerja masing-masing Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, maka Kerangka Pendanaan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai POM di Mamuju tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kerangka Pendanaan Kegiatan 2019

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEUANGAN PER INDIKATOR
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	1.004.617.310
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	961.467.976
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	961.467.976
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	961.467.976
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	961.467.976
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	963.019.143
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	247.516.000
		Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	247.516.000
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	1.791.031.000
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	396.611.500
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	110.892.000
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	311.864.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	47.974.000
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	151.800.000
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	240.173.000
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	7.676.668.143
TOTAL			17.035.554.000

Sumber :DIPA Revisi Terakhir Diolah Penyusun, 2020

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan

peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Balai POM di Mamuju, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat Badan POM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan *private sector* yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga *expert* pada proyek yang dikerjakan samakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Balai POM di Mamuju dalam mendukung program-program Badan POM. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Balai POM di Mamuju. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara Balai POM di Mamuju sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Balai POM di Mamuju tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik, Balai POM di Mamuju juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Balai POM di Mamuju bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama Balai POM di Mamuju bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan

tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Balai POM di Mamuju dalam pengawasan Obat dan Makanan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, antara Kepala Balai POM di Mamuju sebagai penerima amanah dengan Kepala Badan POM RI sebagai pemberi amanah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Mamuju sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Mamuju) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2019 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Mamuju.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai atau setelah alokasi anggaran. Adapun Lampiran Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	71.00
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	94.00
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	84.00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	87.00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	93.00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	80.00
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	61.00
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	66.00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Mamuju	61.00
		Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100.00
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	42.00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	50.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BPOM di Mamuju	85.00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	60.00
	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM Mamuju	50.00
4	Terwujudnya RBBPOM di Mamuju sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BPOM di Mamuju	81.00

Sumber: Dokumen PK Balai POM di Mamuju Tahun, 2019

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau kinerja dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Untuk pemantauan secara berkala, telah dibuat Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (RAPK) untuk target kinerja Triwulan, sehingga capaian kinerja bukan

dikumpulkan pada saat penyusunan laporan kinerja tetapi dimonitor dan dievaluasi pertriwulan. Berikut ini Tabel RAPK Balai POM di Mamuju Tahun 2019.

Tabel 4. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	TARGET			
				B3	B6	B9	B12
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
		Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	42.00	5.00	10.00	20.00	42.00

		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50.00	10.00	20.00	30.00	50.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00

Sumber: Dokumen RAPK Balai POM di Mamuju, 2019

Tabel 4 diatas merupakan Tabel kertas kerja yang digunakan oleh pimpinan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pertriwulan. Sehingga dapat memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan.

KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Sasaran Program dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Setiap akhir periode kegiatan instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Berbeda dengan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan.

Adapun cara pengukuran dan Kriteria pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Cara Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja :

Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus

$$:\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 1}$$

Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 2}$$

Tabel 5. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2019

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2019
Sangat Kurang	<50
Kurang	50 - <70
Cukup	70 - <90
Baik	90 - <110
Sangat Baik	110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	> 120

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah rendahnya penetapan target kinerja tahunan;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. *Me-review* penetapan target kinerja tahunan;

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 telah ditetapkan 6 (enam) Sasaran Kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan tersebut telah ditetapkan 16 (enam belas) indikator kinerja kegiatan dan semua indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sehingga dalam pengukuran pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2019 dihitung berdasarkan 6 Sasaran Kegiatan dengan 16 indikator kinerja dengan target seperti yang telah dijabarkan sebelumnya.

Berdasarkan cara perhitungan dan kriteria yang telah ditetapkan, secara ringkas disampaikan Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Balai POM di Mamuju Tahun 2019 dalam Tabel 6 dan Tabel 7 berikut ini.

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2019

NO.	SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	89.92	CUKUP
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	105.77	BAIK
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	107.43	BAIK
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	83.12	CUKUP
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50.00	KURANG
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	86.57	CUKUP

Sumber: Data RAPK Diolah Penyusun, 2020

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Mamuju Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	71.00	51.85	73.03	CUKUP
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	94.00	90.40	96.17	BAIK
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	84.00	65.79	78.32	CUKUP
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	87.00	92.31	106.10	BAIK
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	93.00	81.70	87.85	CUKUP
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	80.00	78.43	98.04	BAIK
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	61.00	68.04	111.54	SANGAT BAIK
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	66.00	66.00	100.00	BAIK
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Mamuju	61.00	65.53	107.43	BAIK
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100.00	100.00	100.00	BAIK
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	42.00	31.03	73.89	CUKUP
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	50.00	25.00	50.00	KURANG
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BPOM di Mamuju	85.00	100.00	117.65	SANGAT BAIK
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	60.00	17.20	74.07	CUKUP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM Mamuju	50.00	25.00	50.00	KURANG
6	Terwujudnya RBBalai POM di Mamuju sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BPOM di Mamuju	81.00	70.12	86.57	CUKUP

Sumber: Data RAPK Diolah Penyusun, 2020

Dalam Tabel 6 dan 7 diatas dapat dilihat bahwa dari 6 (enam) sasaran kegiatan terdapat 1 (satu) sasaran yang memiliki kriteria Kurang, 3 (tiga) sasaran dengan kriteria Cukup dan 2 (dua) sasaran dengan kriteria Baik. Sedangkan jika dilihat dari masing-masing indikator kinerja dari 16 (enam belas) indikator kegiatan terdapat 2 (dua) indikator yang memiliki kriteria Kurang, 6 (enam) indikator dengan kriteria Cukup, 6 (enam) indikator dengan kriteria Baik, dan 2 (dua) indikator dengan kriteria Sangat Baik. Selanjutnya penjelasan lebih lengkap mengenai setiap capaian akan dijelaskan pada penjelasan setiap capaian sasaran kegiatan.

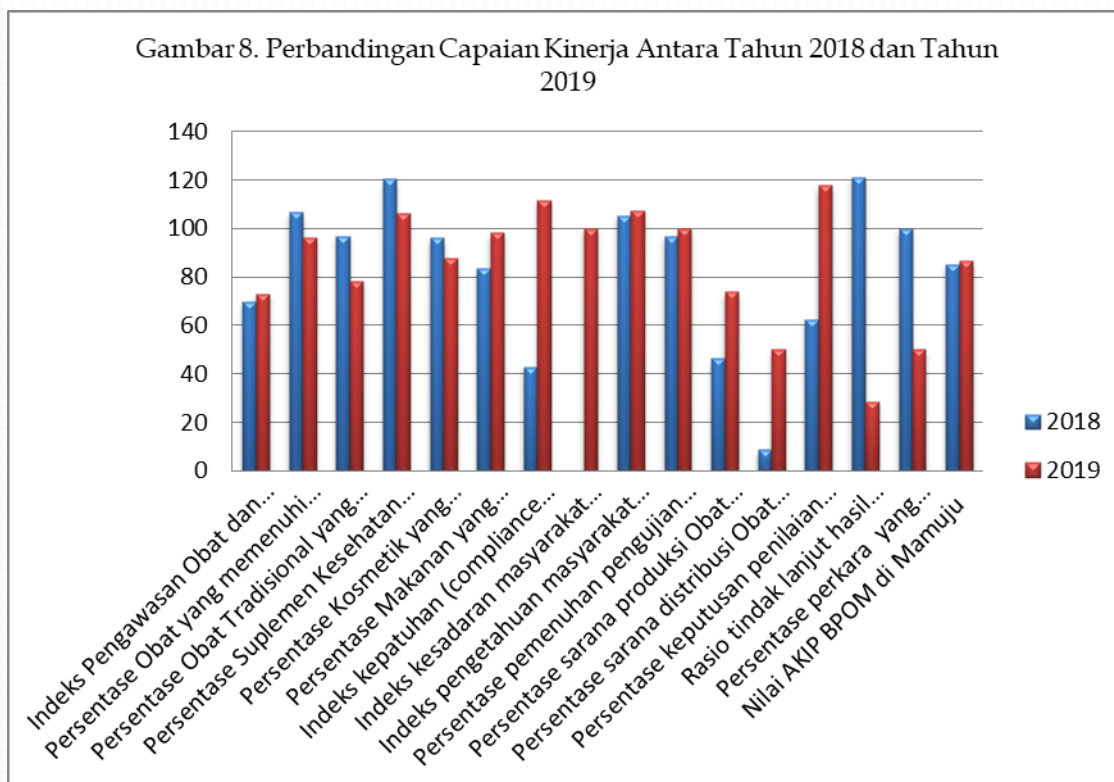
Selain mengukur capaian pada Tahun 2019 perlu juga untuk melihat capaian di tahun sebelumnya untuk melihat seberapa besar persentase kenaikan atau penurunan capaian dari tahun sebelumnya.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Antara Tahun 2018 dan Tahun 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	69.71	73.03
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	106.56	96.17
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	96.70	78.32
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	120.48	106.10

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	95.91	87.85
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	83.53	98.04
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	42.93	111.54
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	-	100.00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Mamuju	105.30	107.43
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	96.71	100.00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	46.30	73.89
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	8.63	50.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BPOM di Mamuju	62.50	117.65
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	121.06	74.07
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM Mamuju	100.00	50.00
6	Terwujudnya RBBPOM di Mamuju sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BPOM di Mamuju	84.94	86.57

Sumber: Data Lapkin 2018 dan RAPK Diolah Penyusun, 2020



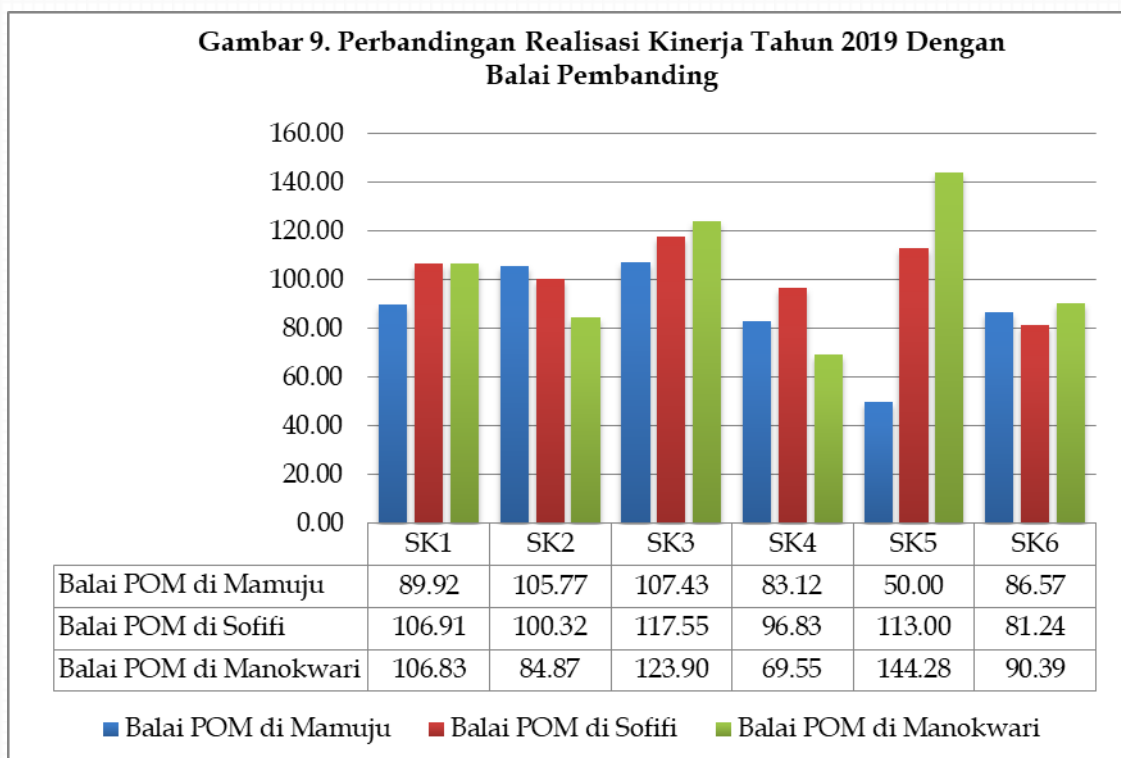
Sumber: Data Lapkin 2018 dan RAPK Diolah Penyusun, 2020

Berdasarkan klasifikasi balai pembanding Tahun 2019, sesuai dengan pembagian Klaster, Balai POM di Mamuju masuk kedalam Klaster 8 dengan Balai Pembanding yaitu Balai POM di Sofifi dan Balai POM di Manokwari. Berikut ini tabel dan gambar yang menunjukkan perbandingan capaian kinerja dengan balai pembanding Tahun 2019.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja Per Sasaran Kegiatan dengan Balai POM
Pembanding Tahun 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN BALAI POM DI MAMUJU	CAPAIAN BALAI POM DI SOFIFI	CAPAIAN BALAI POM DI MANOKWARI
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.	89.92	106.91	106.83
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	105.77	100.32	84.87
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman	107.43	117.55	123.90
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	83.12	96.83	69.55
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai/BBPOM	50.00	113.00	114.28
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja BB/ Balai POM	86.57	81.24	90.39

Sumber: Data Lapkin 2019 Diolah Penyusun, 2020



Sumber: Data Lapkin 2019 Diolah Penyusun, 2020

Tabel 9 dan Gambar 9 menunjukkan perbandingan capaian kinerja dengan balai pembanding di Klaster 8. Sasaran Kegiatan pertama, yaitu *“Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu”*, capaian Balai POM di Mamuju masih berada dibawah capaian Balai POM di Sofifi dan Balai POM di Manokwari, hal ini dikarenakan salah satu indikator yaitu Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Mamuju masih tergolong rendah. Bertambahnya jumlah SDM di tahun berjalan, diharapkan indeks pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM Mamuju dapat meningkat, sehingga capaian Sasaran Kegiatan 1 juga dapat ditingkatkan.

Pada Sasaran Kegiatan kedua *“Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan”*, pencapaian Balai POM di Mamuju lebih tinggi dibandingkan kedua balai pembanding, hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Mamuju telah mengoptimalkan kinerjanya dalam upaya mengawal dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Sasaran Kegiatan ketiga *“Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman”*, kriteria pencapaian Balai POM di Mamuju lebih rendah dari dua Balai pembanding yaitu Balai POM di Sofifi dan di Manokwari, namun Balai POM di Mamuju dan Balai POM di Sofifi dalam kriteria yang sama yaitu *“Baik”* sedangkan untuk capaian Balai POM di Manokwari masuk ke dalam kriteria *“Tidak Dapat Disimpulkan”*. Hal ini memperlihatkan terdapat peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman, yang diperlihatkan oleh nilai indeks pengetahuan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat yang meningkat. Hal ini karena gencarnya Balai POM di Mamuju melakukan KIE kepada masyarakat, baik melalui dialog interaktif di media Televisi, Radio dan Media Cetak melalui Penyebaran Informasi dan Pameran.

Sasaran Kegiatan keempat yaitu *“Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko”*, pencapaian Balai POM di Mamuju lebih rendah dibandingkan Balai POM di Sofifi dan lebih tinggi dibandingkan pencapaian Balai POM di Manokwari, hal ini memperlihatkan bahwa dalam 2 tahun terakhir, Balai POM di Mamuju selalu berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini juga tidak lepas dari peranan *stakeholder* dan lintas sektor terkait yang senantiasa kooperatif dalam berbagai kegiatan-kegiatan pengawasan oleh Balai POM di Mamuju.

Sasaran Kegiatan ke lima yaitu *“Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM”*, pencapaian Balai POM di Mamuju berada dibawah kedua Balai pembanding. Adanya keterbatasan SDM yaitu jumlah Penyidik PNS aktif, dimana hanya terdapat 2 (dua) orang di Balai POM di Mamuju. Diharapkan dengan bertambahnya jumlah PPNS dapat mengoptimalkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Pada Sasaran Kegiatan ke enam *“Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM”*, capaian Balai POM di Mamuju berada diatas Balai POM di Sofifi dan dibawah Balai POM Manokwari. Perbedaan nilai capaian ini karena menggunakan indikator nilai AKIP. Pada tahun 2019 nilai AKIP Balai POM di Mamuju mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Nilai ini masih berada dalam kriteria *“Cukup”* dan perlu lebih ditingkatkan lagi kedepannya. Untuk itu, Balai POM di Mamuju senantiasa berusaha meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh staf Balai POM di Mamuju terhadap implementasi SAKIP di lingkungan Balai POM di Mamuju dan mendorong peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja Balai POM di Mamuju melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga setiap kendala maupun pencapaian yang diperoleh dapat segera ditindaklanjuti untuk mendukung pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju.

ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Mamuju, sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN 1

“Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Balai POM di Mamuju”

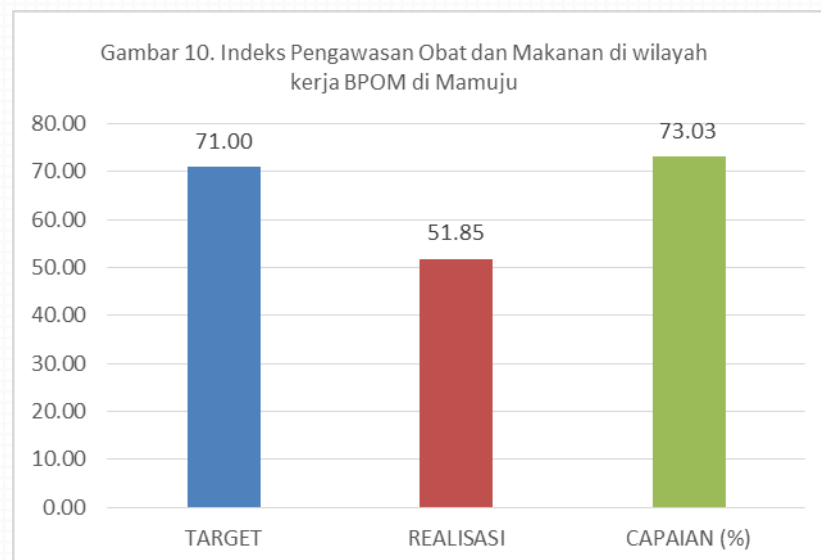
Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 1 (SS1) didasarkan pada penilaian terhadap 6 indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 BPOM di Mamuju Tahun 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	71,00	51,85	73,03	CUKUP
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	94,00	90,40	96,17	BAIK
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	84,00	65,79	78,32	CUKUP
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	87,00	92,31	106,10	BAIK
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	93,00	81,70	87,85	CUKUP
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Mamuju	80,00	78,43	98,04	BAIK
		Rata-Rata			89,92	CUKUP

Persentase capaian kinerja 6 (lima) Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Kegiatan 1 tahun 2018 berkisar antara 73,03 s/d 106,10%. Ke enam indikator kinerja yang diukur, secara rata-rata memiliki kriteria “Cukup”. Pencapaian tertinggi terdapat pada Indikator Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat, Sedangkan pencapaian yang belum optimal yaitu Indeks POM dengan nilai 73,03%, tetapi pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 69,71 %. Untuk itu Balai POM di Mamuju akan terus berupaya mengoptimalkan tingkat efektifitas kinerja dalam hal Pengawasan Obat dan Makanan sehingga nilai indeks POM dapat meningkat.

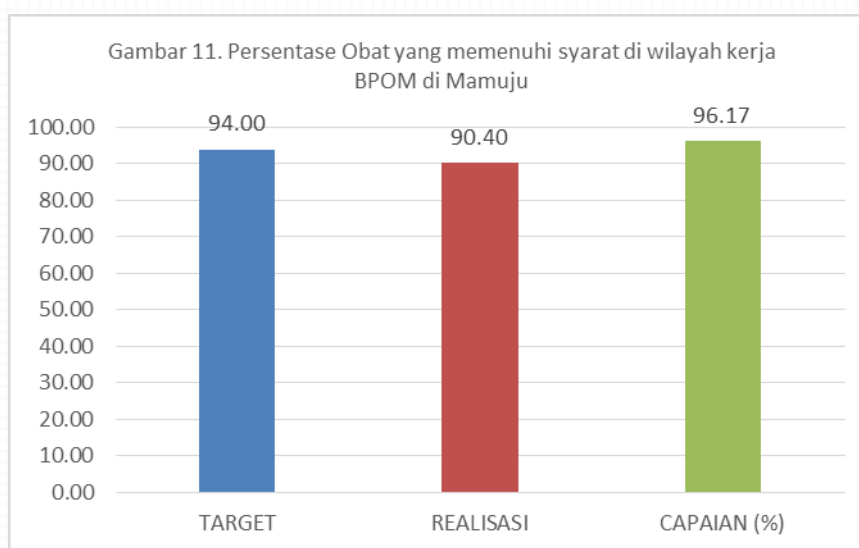
1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju



Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektifitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal Hierarchy Process (AHP)* untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Realisasi Indeks POM Balai POM Mamuju pada tahun 2019 adalah 51,85 dengan capaian 73,03%, hasil ini mengalami peningkatan dari tahun sbelumnya yaitu 69,71%.

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan masih termasuk rendah dibandingkan Balai POM di Sofifi dan Balai POM di Manokwari, untuk itu Balai POM di Mamuju akan senantiasa mengoptimalkan kinerja dalam hal Pengawasan Obat dan Makanan untuk meningkatkan kinerja agar pencapaian nilai indeks POM dan mencapai target nilai indeks POM di Akhir 2020.

2. Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat



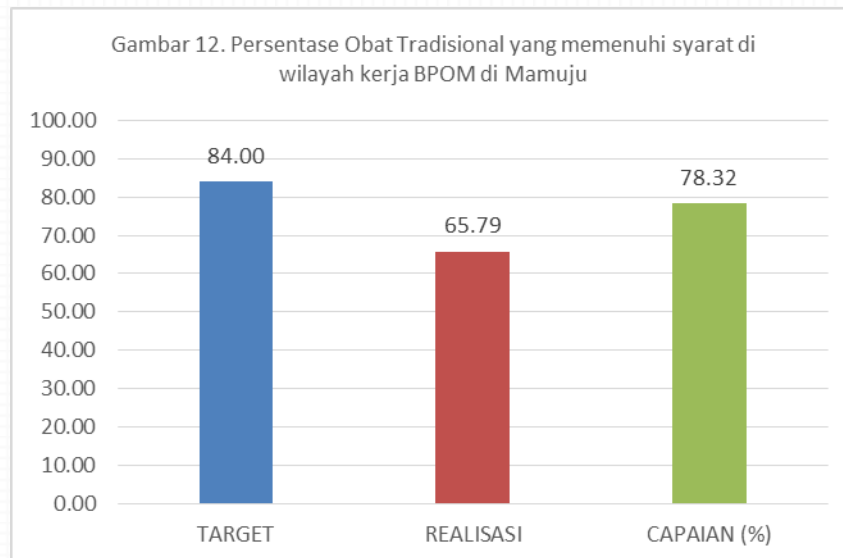
Capaian Realisasi pemenuhan target Persentase Obat yang memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Mamuju adalah 96,17 dengan capaian 96,17%, hal ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 99,10% dengan capaian 106,56%, dihitung dari perbandingan jumlah produk obat yang memenuhi syarat yaitu 113 yang merupakan hasil pengurangan dari total jumlah sampling dikurangi total jumlah produk TMS yaitu 12 sampel terhadap jumlah seluruh produk obat yang diuji (125) sampel. Adapun sampel obat yang tidak memenuhi syarat tersebut disebabkan oleh penandaan atau label obat yang tidak memenuhi ketentuan, karena berbeda dengan label obat yang disetujui pada saat registrasi. Penurunan capaian pada indikator ini dari tahun sebelumnya karena adanya perubahan dalam pengambilan kesimpulan produk termasuk kategori MS dan TMS. Di tahun 2019, ketika sampel tidak memenuhi ketentuan dalam penandaan atau pelabelan meskipun MS pengujian tetap disimpulkan dalam kategori TMS.

Produk obat yang diuji meliputi obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika serta ditetapkan melalui hasil pengujian laboratorium. Balai POM di Mamuju senantiasa berupaya agar obat yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju senantiasa bermutu, melindungi masyarakat dari obat yang berisiko terhadap kesehatan. Pencapaian ini masuk dalam kriteria BAIK, hal ini tidak terlepas dari upaya Balai POM di Mamuju dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dalam mewujudkan obat dan makanan yang aman dan bermutu, yang antara lain melalui :

- Pemberian sanksi administratif maupun *projustitia* kepada sarana distribusi resmi dan tidak resmi yang menjual bebas produk obat keras tanpa hak dan kewenangan.
- Melakukan KIE kepada masyarakat melalui kegiatan penyebaran informasi dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, pelajar, organisasi pemuda, Ibu-ibu PKK, dan dharma wanita dan diharapkan dapat meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat di lingkungan dimana mereka berada.
- Penyebab kesimpulan produk TMS sebagian besar karena banyaknya produk yang TMK dalam penandaan dan pelabelan. Maka sangat perlu dilakukan peninjauan ulang oleh BPOM Pusat terkait produk yang dikategorikan TMS dan meningkatkan koordinasi Balai dengan Pusat terkait dengan pelaporan penandaan dan pelabelan produk yang masuk kategori TMS.

Untuk menjamin keamanan, manfaat dan mutu obat yang sampai kepada masyarakat tetap baik, maka perlu dilakukan pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan terhadap sarana distribusi obat maupun sarana pelayanan kefarmasian, agar selalu menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) secara konsisten.

3. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat



Realisasi pemenuhan target Persentase Obat Tradisional yang memenuhi Syarat di Provinsi Sulawesi Barat adalah 65,79 dengan capaian 78,32 %, capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 96,70%, Capaian ini dihitung dari perbandingan jumlah produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat yaitu 50 sampel, yang merupakan hasil pengurangan dari total jumlah sampling OT yaitu 76 sampel dikurangi total jumlah produk TMS 26 sampel.

Adapun penyebab menyebabkan rendahnya presentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat adalah karena penandaan atau label obat tradisional yang tidak sesuai ketentuan karena perbedaan antara label yang disetujui pada saat registrasi. Hal ini menyebabkan presentase OT yang memenuhi syarat menjadi rendah walaupun hasil pengujiannya memenuhi syarat.

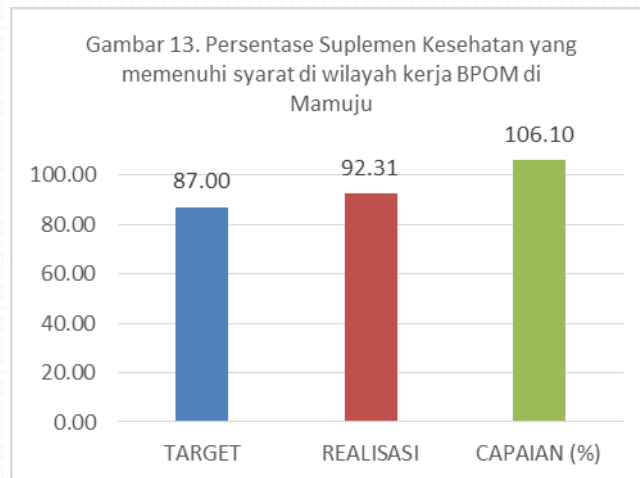
Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi target presentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi barat antara lain:

- Penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi maupun distribusi yang melakukan pelanggaran memproduksi dan/atau mengedarkan obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), tidak memiliki

izin edar maupun yang telah dibatalkan Nomor Izin Edarnya oleh Badan POM RI (*Public Warning* Badan POM RI);

- Pengawasan terhadap pelaku usaha obat tradisional baik produsen maupun distributor masih perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar obat tradisional yang beredar di masyarakat memenuhi syarat keamanan, mutu dan khasiat;
- Penyebaran informasi dengan melakukan
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media massa baik cetak maupun elektronik yang intensif oleh Balai POM di Mamuju kepada masyarakat tentang obat tradisional yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan khasiat, serta mensosialisasikan cara untuk mengetahui produk yang telah terdaftar di Badan POM RI dengan mengakses situs web www.ceknip.pom.go.id;
- Melakukan Operasi Penindakan terhadap pelanggaran peredaran obat tradisional bersama pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dengan berfokus pada pemutusan mata rantai peredaran obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), tidak memiliki izin edar maupun yang telah dibatalkan Nomor Izin Edarnya oleh Badan POM RI.
- Lebih rendahnya capaian kinerja pada tahun 2019 jika dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan kesimpulan produk TMS sebagian besar disebabkan oleh banyaknya produk yang TMK dalam penandaan dan pelabelan. Maka sangat perlu dilakukan peninjauan ulang oleh BPOM Pusat terkait produk yang dikategorikan TMS dan meningkatkan koordinasi Balai dengan Pusat terkait dengan pelaporan penandaan dan pelabelan produk yang masuk kategori TMS.

4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat



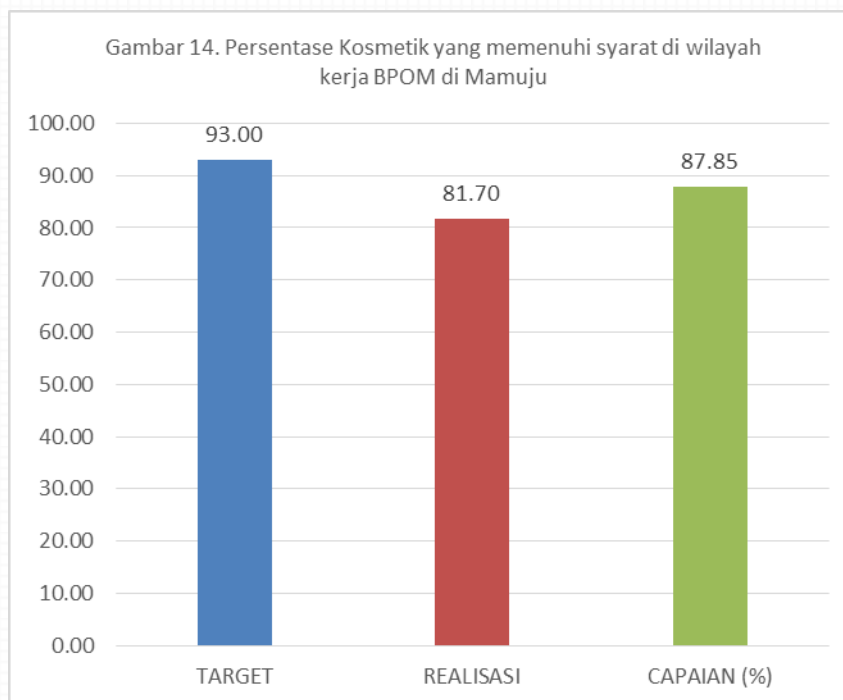
Realisasi pemenuhan target Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Mamuju adalah 92,31% dengan capaian 106,10%. Dari jumlah total sampel Suplemen kesehatan yaitu 26 sampel, dimana terdapat 2 sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena label yang tidak memenuhi ketentuan.

Balai POM di Mamuju sejak tahun 2018 telah berhasil melampaui target persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat, hal ini diharapkan akan terus dipertahankan mengingat semakin maraknya peredaran Suplemen Kesehatan di masyarakat. Untuk menurunkan angka peredaran produk Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan, Balai POM di Mamuju telah melakukan beberapa upaya diantaranya :

- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Suplemen Kesehatan yang memenuhi standar dengan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media massa baik cetak maupun elektronik;
- Pengawasan terhadap pelaku usaha baik produsen maupun distributor Suplemen Kesehatan yang masih perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar produk yang beredar memenuhi syarat mutu, keamanan dan manfaat.
- Penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi maupun sarana distribusi yang melakukan pelanggaran.

- Penyebaran Informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* produk Suplemen Kesehatan yang diterbitkan oleh Badan POM RI.

5. Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat



Realisasi pemenuhan target Persentase Kosmetika yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 81,70% dengan capaian 87,85%. Hasil ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 yaitu 95,91%. Nilai ini diperoleh dari perbandingan jumlah kosmetik yang memenuhi syarat yaitu 125 sampel dengan jumlah total kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan sebanyak 153 sampel.

Di era digital dimana semakin banyak transaksi jual beli kosmetika secara *on-line*, terutama dalam wilayah kerja Balai POM di Mamuju menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan sistem pengawasan dalam mewujudkan Kosmetika yang aman dan bermutu di wilayah Kerja Balai POM di Mamuju.

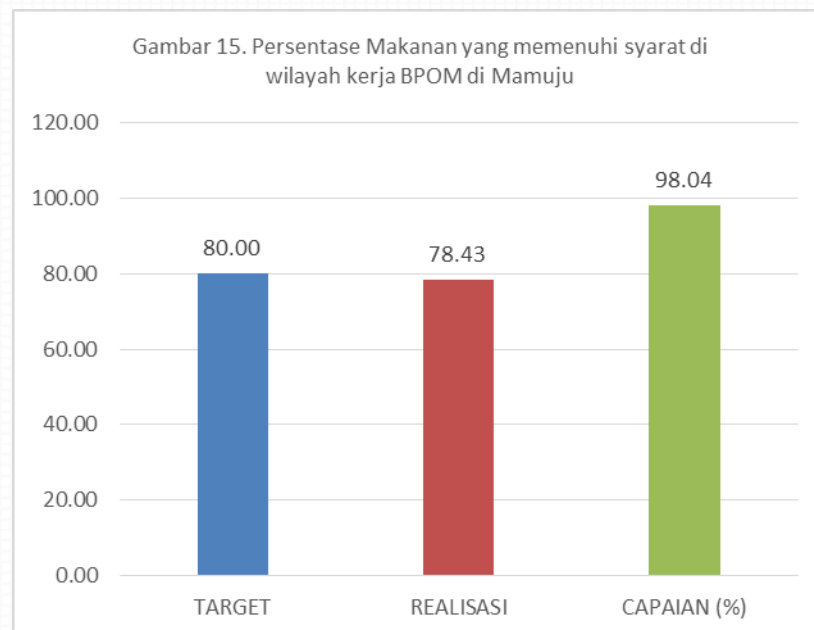
Beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya presentase Kosmetika yang memenuhi syarat adalah karena penandaan atau label kosmetika yang tidak sesuai ketentuan. Karena sistem notifikasi tidak mewajibkan pihak produsen kosmetika untuk mendaftarkan label terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan presentase

kosmetika yang memenuhi syarat menjadi rendah walaupun hasil pengujiannya memenuhi syarat.

Beberapa Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kosmetik yang tidak memenuhi syarat diperlukan antara lain :

- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan kosmetika yang memenuhi standar, karena masyarakat cenderung menggunakan kosmetika dengan hasil yang instan untuk sediaan perawatan kulit (memutihkan, mencerahkan, mengencangkan, menghaluskan), warna yang mencolok pada sediaan rias wajah (pewarna dilarang), kosmetika tanpa izin edar (*illegal*) baik impor maupun lokal;
- Pengawasan terhadap pelaku usaha kosmetika baik produsen maupun distributor masih perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar kosmetika yang beredar di masyarakat memenuhi syarat mutu, keamanan dan manfaat;
- Penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi maupun distribusi yang melakukan pelanggaran antara lain memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, tidak memiliki izin edar dan yang sudah ditarik dari peredaran berdasarkan *Public Warning* Badan POM RI;
- Penyebaran informasi dengan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media massa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan kosmetika yang memenuhi syarat mutu, keamanan dan manfaat;
- Penyebaran Informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* produk kosmetik yang diterbitkan oleh Badan POM RI;
- Melakukan Operasi Penindakan terhadap pelanggaran peredaran kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan kepolisian daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Melakukan Operasi Terpadu dengan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM RI khusus untuk komoditi kosmetika.

6. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat



Realisasi pemenuhan target Persentase Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 78,43% dengan Capaian 98,04%. Nilai ini meningkat dari capaian tahun 2018 yaitu 83,53%, dimana jumlah sampel yang memenuhi syarat sebanyak 120 sampel dengan total sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis sebanyak 153 sampel. Beberapa sampel makanan yang tidak memenuhi syarat diantaranya positif mengandung Pewarna yang dilarang untuk pangan (pewarna tekstil), Bahan Tambahan Pangan (pengawet dan pemanis) melebihi batas yang ditentukan serta positif mengandung pemanis tanpa mencantumkan pada label. Dari tahun sebelumnya juga terdapat perubahan kesimpulan terhadap produk pangan yang dikategorikan MS dan TMS. Tahun 2019, jika produk pangan TMK dalam penandaan dan pelabelan maka secara otomatis akan dikategorikan produk TMS. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya dimana produk pangan dikategorikan TMS jika TMS hasil uji saja tanpa melihat evaluasi dalam penandaan dan pelabelan.

Belum optimalnya presentase makanan yang memenuhi syarat juga disebabkan oleh penandaan atau label pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Namun demikian Balai POM di Mamuju akan tetap berupaya maksimal dalam mengawasi peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat; diantaranya melalui:

- Penyebaran informasi yang intensif melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media massa baik cetak maupun elektronik kepada masyarakat terhadap makanan yang bermutu, aman dan bermanfaat;
- Pemberdayaan masyarakat melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dengan melibatkan komunitas sekolah, Industri Rumah Tangga (IRTP), Ritail, PKK dan Kader Keamanan Pangan Desa.
- Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap mutu produk makanan termasuk PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) yang beredaran mendorong pelaku usaha/produsen makanan untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar;

Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan *premarket* dan *post market* terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD berakibat pada meningkatnya tingkatkepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat;

- Penerapan sanksi administrasi maupun *Projustitia* pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.

SASARAN KEGIATAN 2

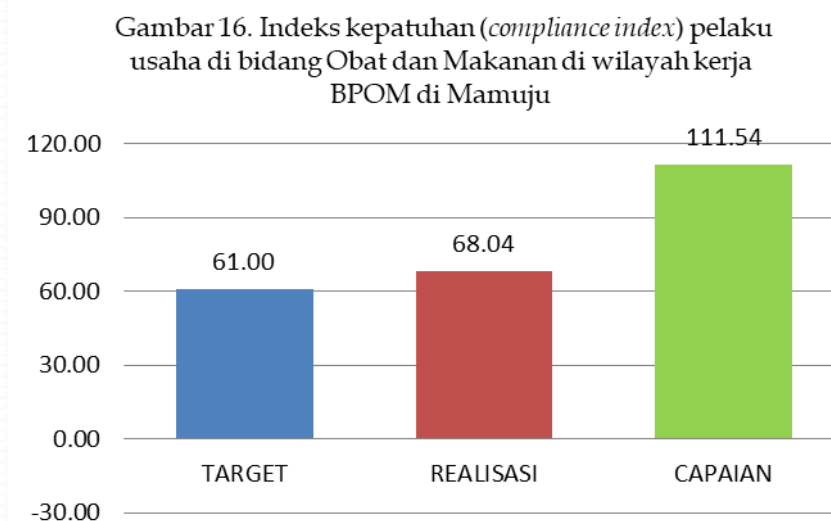
“Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 2 didasarkan pada penilaian terhadap 2 indikator yaitu Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju dan Indeks kesadaran masyarakat (*awereness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 BPOM di Mamuju Tahun 2019

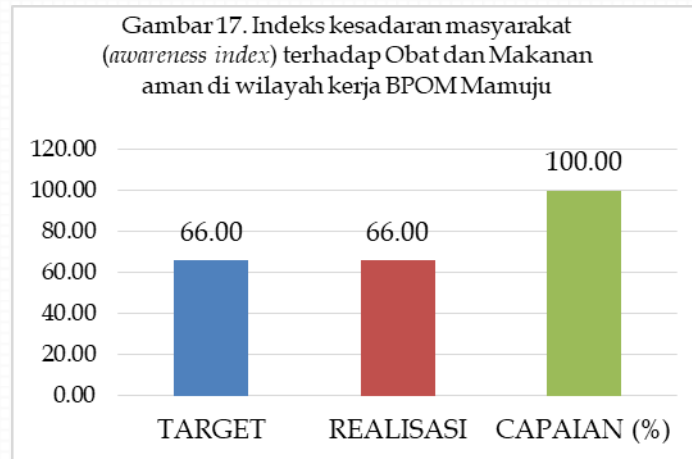
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	61,00	68,04	111,54	SANGAT BAIK
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB/BPOM Mamuju	66,00	66,00	100,00	BAIK
		Rata-Rata			105,77	BAIK

1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju



Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Nilai Indeks kepatuhan Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju pada tahun 2019 adalah 68,04 dengan capaian 111,54%, nilai capaian ini meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 25,76 dengan persentase capaian 42,93 %.

2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BB/BPOM Mamuju



Untuk indikator Indeks kesadaran masyarakat masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, nilai ini diukur mulai tahun 2019. Target yang diberikan adalah 66, Balai POM di Mamuju berhasil merealisasikan target tersebut dengan hasil capaian 100%.

Hasil ini tidak lepas dari peran Balai POM di Mamuju yang senantiasa aktif memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait segala aspek yang berkaitan dengan keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan. Diharapkan agar hasil ini dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan, dengan menjangkau lebih banyak daerah yang masih kurang mendapatkan intervensi karena kondisi geografis dan keterbatasan petugas, melalui penyampaian Informasi maupun pengawasan rutin oleh Balai POM di Mamuju.

SASARAN KEGIATAN 3

“Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 3 didasarkan pada penilaian terhadap indikator Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 BPOM di Mamuju Tahun 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Mamuju	61,00	65,53	107,43	BAIK

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM yaitu Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei. Hasil survei menunjukkan Balai POM di Mamuju memperoleh nilai indeks pengetahuan 65,53% dari target 61%, sehingga capaian yang diperoleh adalah 107,43%. Nilai capaian tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 105,30 % dengan kategori Baik. Pencapaian ini diharapkan akan terus dipertahankan dan ditingkatkan oleh Balai POM di Mamuju. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

- Balai POM di Mamuju senantiasa meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan mengadakan Penyampaian Informasi maupun KIE terkait Obat dan Makanan
- Penyebaran informasi yang intensif melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media massa baik cetak maupun elektronik kepada masyarakat terhadap makanan yang bermutu, aman dan bermanfaat;
- Pemberdayaan masyarakat melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dengan melibatkan komunitas sekolah, Industri Rumah Tangga (IRTP), Ritail, PKK dan Kader Keamanan Pangan Desa.

SASARAN KEGIATAN 4

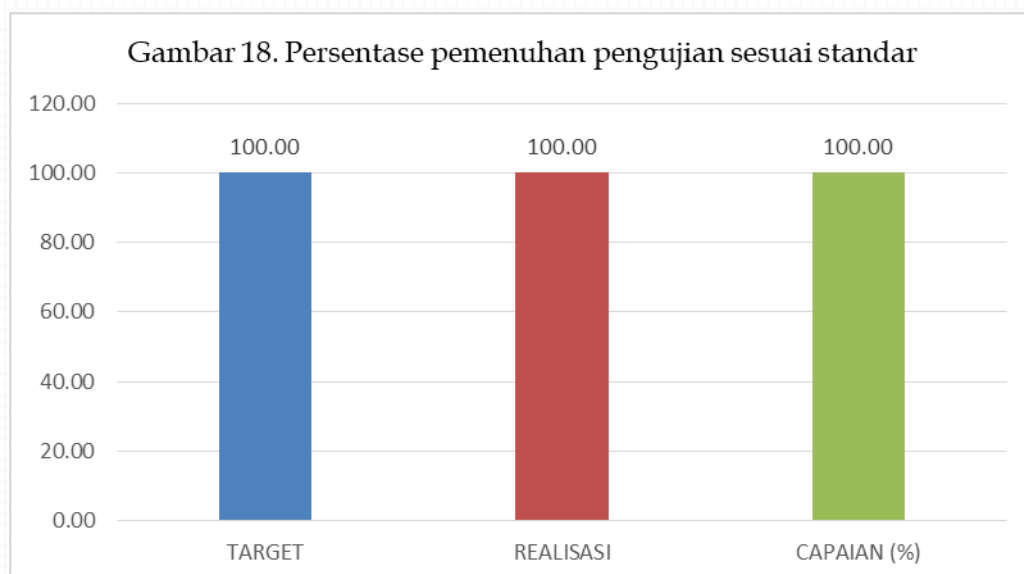
“Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah kerja Balai POM di Mamuju”

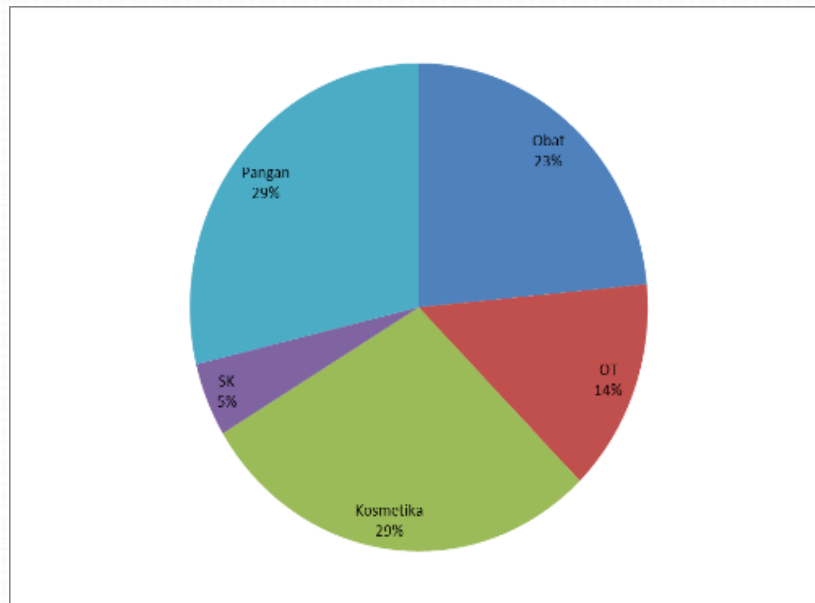
Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 4 didasarkan pada penilaian terhadap 5 indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju.

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 BPOM di Mamuju Tahun 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100.00	100.00	100.00	BAIK
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	42.00	31.03	73.89	CUKUP
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	50.00	25.00	50.00	KURANG
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BPOM di Mamuju	85.00	100.00	117.65	SANGAT BAIK
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	60.00	44.44	74.07	CUKUP
Rata-Rata					83.12	CUKUP

1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat

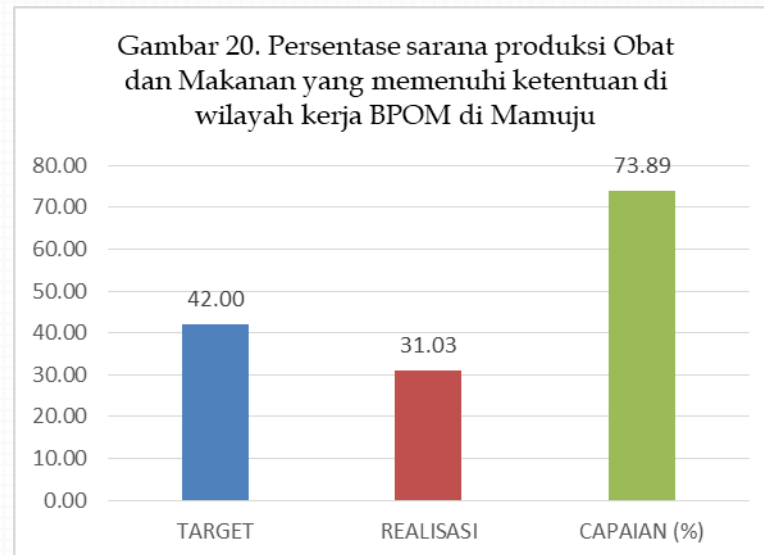




Gambar 19. Jumlah Komoditi yang di Sampling

Realisasi pemenuhan target pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat adalah 100% dengan capaian 100%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 96,71%, dihitung dari perbandingan jumlah sampel obat dan makanan yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar yaitu 532 sampel yang diselesaikan di tahun 2019. Jumlah yang harus diuji yaitu 532 dengan rincian Obat (125 sampel), Obat Tradisional (75 sampel), Kosmetika (153 sampel) Suplemen Kesehatan (26 sampel) dan pangan (153 sampel). Peningkatan capaian ini salah satunya disebabkan oleh adanya penambahan CPNS Tahun 2019 di Seksi Pengujian sebanyak 3 Orang. Balai POM di Mamuju dengan keterbatasan fasilitas tetap berusaha untuk memenuhi target pengujian sesuai dengan perjanjian kinerja. Pelaksanaan Fungsi pengujian selama tahun 2019 masih dilakukan di Laboratorium Balai Besar POM di Makassar. Di Tahun 2020 dengan bertambahnya SDM dan fasilitas yang dimiliki, Balai POM di Mamuju terus berusaha mengoptimalkan capaian kinerja pengujian sesuai dengan perjanjian kinerja.

2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.



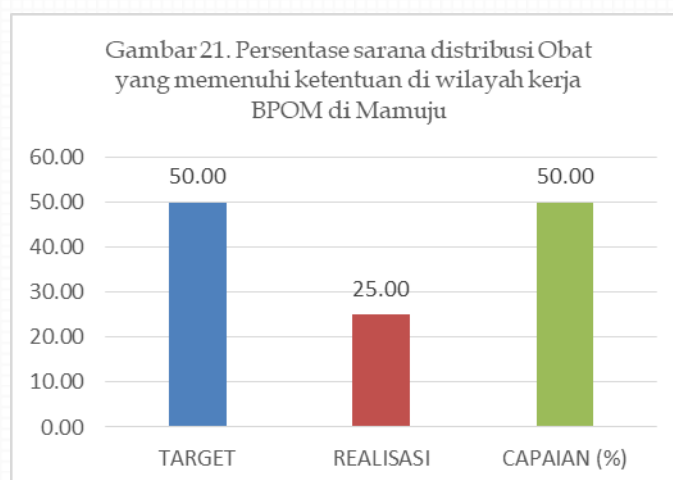
Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 31,03% dengan capaian 73,89%. Nilai capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 46,30%. Nilai capaian diperoleh dari perbandingan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu 9 sarana, terhadap jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa yaitu 29 sarana. Peningkatan capaian ini disebabkan oleh mulai pahamnya sarana produksi terkait terhadap pentingnya pemenuhan terhadap Higiene dan Sanitasi mengingat keberadaan Balai POM di Mamuju sudah 3 Tahun. Selain itu edukasi yang dilakukan petugas dalam pemberian pemahaman terhadap pentingnya Higiene dan Sanitasi juga berpengaruh terhadap kenaikan capaian di tahun 2019.

Berikut tabel Data sarana dan cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan Tahun 2019:

Tabel 12. Data Sarana dan Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan Diwilayah Sulawesi Barat Tahun 2019

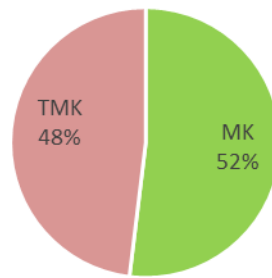
SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA		MEMENUHI KETENTUAN	% SARANA DIPERIKSA MK
	DIWILAYAH SULBAR	YANG DIPERIKSA		
Obat	0	0	0	0.00
Obat Tradisional	0	0	0	0.00
Kosmetika	0	0	0	0.00
Pangan MD	4	3	1	33.00
Pangan IRTP	214	27	8	29.63
Jumlah	218	30	9	30.00

3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju



Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 25% dengan capaian 50%, nilai ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 3,45% dengan capaian 8,63%, dihitung dari perbandingan jumlah sarana distribusi obat diperiksa yang memenuhi ketentuan yaitu 20 sarana, terhadap jumlah sarana distribusi obat yang diperiksa sebanyak 80 sarana. Balai POM di Mamuju senantiasa berusaha untuk membina dan memberi peringatan kepada penanggung jawab sarana distribusi obat, baik sarana pemerintah maupun swasta untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Gambar 22. Presentase Sarana Distribusi Obat yang diperiksa



Cakupan pengawasan sarana distribusi obat yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

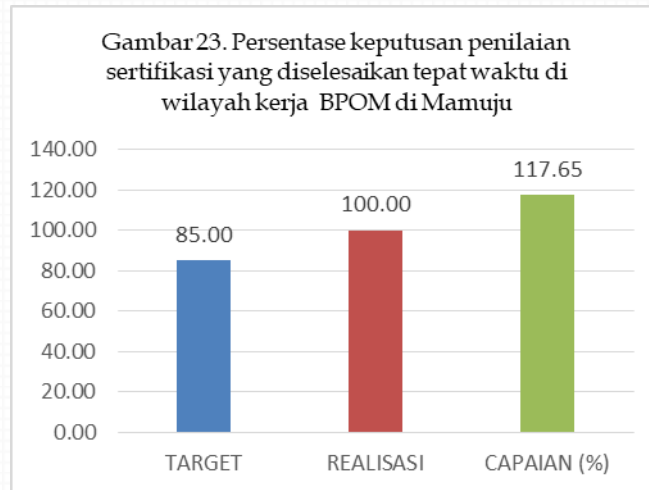
Sarana distribusi Obat dan NAPZA sebanyak 274 sarana, dan petugas BPOM Mamuju telah memeriksa 80 Sarana dengan hasil 20 sarana yang memenuhi ketentuan dan 60 sarana yang tidak memenuhi ketentuan administrasi dan persyaratan fisik bangunan; Berikut ditampilkan jumlah sarana dan Cakupan pengawasan sarana distribusi obat di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 13. Data Sarana dan Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat Diwilayah Sulawesi Barat Tahun 2018

SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH SARANA	
	DIWILAYAH SULBAR	YANG DIPERIKSA
GFK	7	7
Apotek	102	51
Toko Obat	38	6
Rumah Sakit	10	8
Puskesmas	97	6
Balai Pengobatan/Klinik	19	-
PBF	2	2
Jumlah	275	80

Terdapat beberapa sarana distribusi yang berada di kabupaten dengan kondisi geografis masih sulit dijangkau karena jarak tempuh yang jauh dan sarana transportasi belum memadai, menyebabkan terkendalanya pelaksanaan pengawasan pada sarana di daerah tersebut.

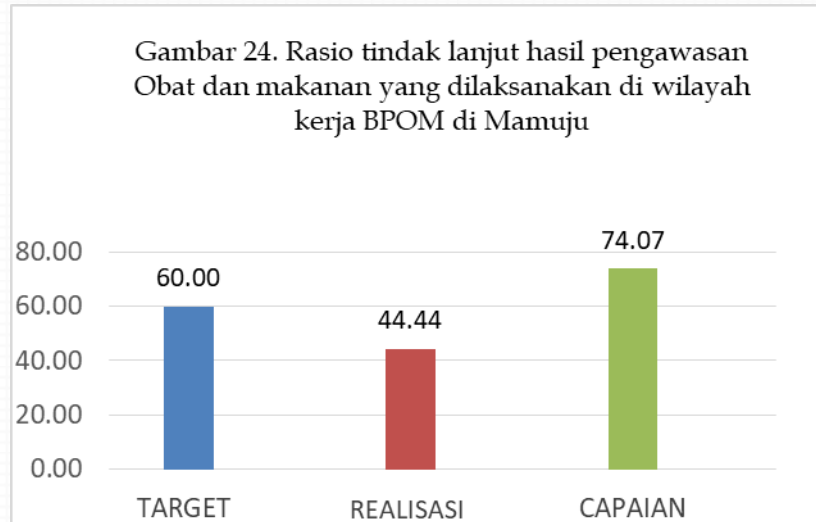
4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat



Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat adalah 100% dengan capaian 117% dengan kriteria “Sangat Baik”. Nilai ini meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 62,50%.

Selama tahun 2019, terdapat 6 sarana yang mengajukan permintaan sertifikasi, dan seluruh permintaan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu sesuai SOP Balai POM di Mamuju yaitu 30 HK. Meningkatnya permintaan sertifikasi pada tahun 2019 tidak terlepas dari peran Balai POM di Mamuju dalam memberikan layanan Informasi dan mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan tipe sarana dari PIRT menjadi MD sehingga produk bisa diedarkan lebih luas sehingga nilai jual dan daya saing produk bisa meningkat.

5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju



Yang dimaksud tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat. Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen. Adapun matrix tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 14. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Oleh Balai POM di Mamuju

Jenis Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Dilakukan oleh Balai POM di Mamuju	Jumlah <i>Feedback</i>	Persentase
Tindak lanjut hasil pengawasan kepada pelaku usaha	65	25	38.46
Tindak lanjut hasil pengawasan kepada instansi terkait	25	15	60.00
Jumlah	90	40	44.44

Sumber: Data Dukung RAPK 2019 Diolah Penyusun, 2020

Pada Gambar 24 dan Tabel 14, Realisasi Persentase Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju adalah 44,44% dengan capaian 74,07%. Nilai ini dihitung dari perbandingan jumlah tindak lanjut *feedback* dari pelaku usaha dan instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait. Pada Tabel 14 dapat dilihat bahwa *feedback* dari pelaku usaha masih tergolong lebih kecil dibandingkan dengan instansi. Hal ini disebabkan karena belum sepenuhnya pelaku usaha memberikan *feedback* dalam bentuk tertulis sehingga tidak tercapai dalam pelaporan. Capaian ini termasuk dalam kriteria Cukup, berdasarkan analisis data dari output indikator ini, Dinas kesehatan merupakan instansi yang paling banyak memberikan *feedback* terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan. *Feedback* dari pelaku usaha terhitung masih sangat kurang, terutama dari sarana distribusi makanan, kosmetik, OT dan SK. Perlu dilakukan review terkait definisi operasional dari tindak lanjut oleh pelaku usaha, karena hasil rekomendasi yang membutuhkan *feedback* berupa CAPA (*Corrective and Preventif Action*) adalah hasil pengawasan sarana Produksi Obat dan Makanan, sarana distribusi obat serta sarana pelayanan kefarmasian. Kooperatifnya tindak lanjut lintas sektor

terutama Dinas kesehatan dari tiap kabupaten juga menjadi faktor pendukung terutama dalam membina sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Seperti yang diketahui bahwa pengawasan sarana produksi pangan yang menjadi kewenangan BPOM adalah Industri Pangan MD dan untuk PIRT diberikan kewenangan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, tetapi dengan adanya permintaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan pembinaan berupa Bimbingan Teknis, pendampingan dan percepatan sertifikasi produk pangan industri rumah tangga (PIRT) serta adanya Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) khususnya komunitas Industri Rumah Tangga, Balai POM di Mamuju juga melakukan pengawasan terhadap PIRT yang ada di wilayah kerja BPOM Mamuju.

Persentase capaian kinerja 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Kegiatan 4 tahun 2019 berkisar antara 16,99% s/d 117,65%. Ke lima indikator kinerja yang diukur di atas rata-rata memperoleh kriteria “Cukup”. Capaian untuk Sasaran Kegiatan tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan capaian 2018 dengan kriteria “Kurang”. Capaian tertinggi diperlihatkan pada Indikator Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju dengan capaian 117,65% dengan Kriteria “Baik”. Hal ini memperlihatkan Balai POM senantiasa mendukung pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas sarana produksinya sesuai dengan pedoman Cara Produksi maupun Cara Distribusi yang baik. Selama tahun 2019 terdapat 6 Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh Balai POM di Mamuju. Capaian terendah terdapat pada indikator persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.

SASARAN KEGIATAN 5

“Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 5 didasarkan pada penilaian terhadap indikator Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5 BPOM di Mamuju Tahun 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM Mamuju	50,00	25,00	50,00	KURANG

Pengukuran terhadap Sasaran Kegiatan ini dilakukan menggunakan indikator kinerja Presentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM pada tahun 2019 dengan realisasi 25% dan capaian 50% Capaian tahun 2019 sama dengan tahun sebelumnya. Rendahnya capaian dalam sasaran kegiatan ini karena capaian sangat tergantung pada lintas sektor terkait dan diluar kendali internal Balai POM di Mamuju. Selain itu jauhnya jarak untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi yang berada di luar Provinsi Sulawesi Barat juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian kinerja Balai POM di Mamuju terhadap sasaran ini.

Pada tahun 2019, terdapat 1 kasus yang sampai pada tahap 2. Total jumlah kasus yang sedang dalam proses penyidikan di balai POM di Mamuju yaitu 6 kasus termasuk carry over dari tahun 2017. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu masih terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangani perkara. Balai POM di Mamuju memiliki 2 orang PPNS aktif yang sedang menangani total 6 perkara diluar dari berbagai kegiatan lainnya dalam seksi pemeriksaan dan penindakan.

Untuk lebih meningkatkan kualitas capaian indikator ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- Kuantitas dan kualitas SDM terkait penyidikan Obat dan Makanan;
- Peningkatan kualitas SDM personil pada bagian penyidikan dengan mengikuti Diklat penyidik (PPNS) dan Diklat Intelijen;

- Koordinasi yang lebih *intens* dengan unsur *Criminal Justice System* di daerah;
- Perlunya penambahan petugas (baik PPNS maupun intelijen), fasilitas transportasi, perlengkapan dan penunjang pelaksanaan investigasi.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan/mempertahankan capaian terhadap Indikator kegiatan ini antara lain:

- Menambah jumlah PPNS dan intelijen melalui rekrutmen pegawai;
- Meningkatkan kompetensi PPNS dan intelijen yang ada dengan mengikuti pelatihan atau *workshop*, pertemuan investigasi awal dan penyegaran proses penyidikan;
- Meningkatkan koordinasi antar PPNS Badan POM RI, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing balai sebagai bahan pembandingan pada kegiatan investigasi awal dan operasi penindakan maupun dalam proses penyidikan;
- Konsultasi dengan Badan POM RI khususnya Deputi di Bidang Penindakan.

SASARAN KEGIATAN 6

"Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju"

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6 BPOM di Mamuju Tahun 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
6	Terwujudnya RBBPOM di Mamuju sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BPOM di Mamuju	81,00	70,12	86,57	CUKUP

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 6 didasarkan pada Nilai AKIP Balai POM di Mamuju. Dimana Balai POM Mamuju memperoleh nilai AKIP 70,12 (Kategori BB), dengan capaian 86,57%. Nilai AKIP BPOM di Mamuju mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 68,80. Balai

POM di Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Balai POM di Mamuju untuk pencapaian indikator kinerja ini diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh staf Balai POM di Mamuju terhadap implementasi SAKIP di lingkungan Balai POM di Mamuju;
2. Mendorong peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja Balai POM di Mamuju melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan setiap bulan sehingga setiap kendala maupun pencapaian yang diperoleh dapat segera ditindaklanjuti untuk mendukung pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju.
3. Meningkatkan ketepatan dalam penyusunan rencana program kegiatan (penetapan target indikator kinerja)
4. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi *e-Performance* sebagai salah satu aplikasi yang telah dikembangkan oleh Badan POM yang merupakan sistem pengelolaan kinerja secara elektronik berbasis *Balance Scorecard* (BSC).
5. Meningkatkan kepedulian dan melakukan penyegaran secara berkala terkait pemahaman maupun implementasi akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi kepada seluruh komponen di Balai POM di Mamuju.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang target Sasaran Kegiatan 6 ini adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan dan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

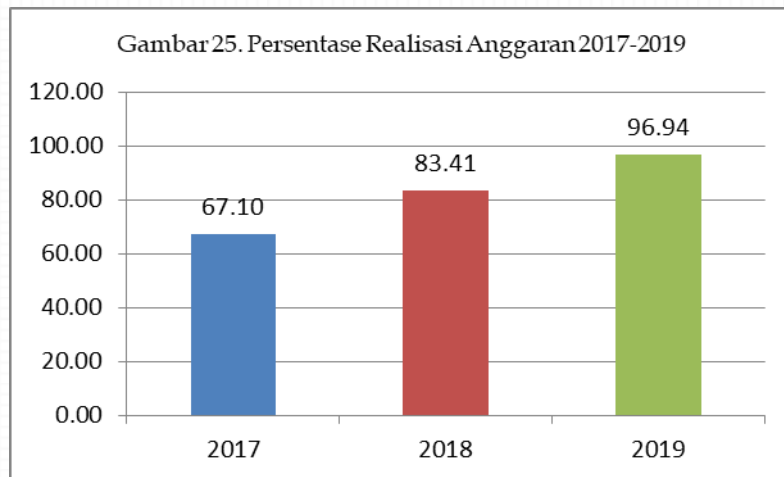
Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Bentuk akuntabilitas keuangan Balai POM di Mamuju Tahun 2019 yaitu melalui penyampaian Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan ke BPOM RI sebagai Eselon I

Tabel 17. Target, Realisasi dan Capaian Anggaran per Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEUANGAN INDIKATOR	REALISASI KEUANGAN INDIKATOR	CAPAIAN KEUANGAN INDIKATOR
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	1.004.617.310	991.707.160	98,71%
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	961.467.976	953.421.940	99,16%
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	961.467.976	953.421.940	99,16%
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	961.467.976	953.421.940	99,16%
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	961.467.976	953.421.940	99,16%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	963.019.143	951.612.272	98,82%
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	247.516.000	216.522.980	87,48%
		Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	247.516.000	216.522.980	87,48%
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	1.791.031.000	1.638.798.349	91,50%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEUANGAN INDIKATOR	REALISASI KEUANGAN INDIKATOR	CAPAIAN KEUANGAN INDIKATOR
	di Mamuju				
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	396.611.500	346.345.244	87,33%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	110.892.000	101.963.090	91,95%
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	311.864.000	267.965.135	85,92%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	47.974.000	42.465.500	88,52%
		Rasio tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	151.800.000	131.252.600	86,46%
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	240.173.000	164.620.099	68,54%
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	7.676.668.143	7.631.119.219	99,41%
Total			17.035.554.000	16.514.582.388	96,94 %

Sumber : Data Money Bappenas Diolah Penyusun, 2020



Pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2019 Balai POM di Mamuju 2019 Balai POM di Mamuju adalah sebesar Rp. 17.035.554.000,-, realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 16.514.582.388,- atau 96,94%. Terjadi kenaikan realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 83,41%.

Balai POM di Mamuju telah berupaya mengelola anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan pengelolaan dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Mamuju dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran beserta pemenuhan kegiatan secara berkala.
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Faktor penyebab belum optimalnya realisasi anggaran antara lain :

1. Belanja Pegawai : Realisasi anggaran pada belanja pegawai sudah cukup optimal, realisasi belum mencapai 100% salah satunya disebabkan karena kurang cermatnya perencanaan anggaran dalam menyusun kebutuhan belanja pegawai.
2. Belanja Barang :
 - a. Keterbatasan SDM dan Kompetensi yang dimiliki di semua bidang khususnya di bidang keuangan menyebabkan realisasi kegiatan dan anggaran belanja barang operasional kurang maksimal.

- b. Adanya revisi anggaran dengan mekanisme DJA yang memerlukan waktu lama pengesahannya sehingga realisasi anggaran beberapa kegiatan mengalami keterlambatan.
- c. Pejabat Pengadaan masih diperbantukan dari satker luar (Dinas PU) sehingga memerlukan waktu dalam berkoordinasi.
- d. Adanya beberapa kegiatan mandiri yang tertunda karena ada kegiatan terpadu yang harus dihadiri di pusat

3. Belanja Modal :

- Penyerapan belanja modal sudah cukup optimal namun dalam perencanaan anggaran belanja modal kedepannya dapat lebih cermat dan teliti lagi.

Agar realisasi anggaran lebih optimal perlu dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut :

- Dilakukan perencanaan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal lebih cermat.
- Peningkatan kompetensi SDM yang ada diberbagai bidang untuk mempercepat realisasi kegiatan dan anggaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi kegiatan dan anggaran dimasing-masing seksi.
- Proses realisasi anggaran dilakukan sesuai perencanaan agar tidak menumpuk di akhir tahun.

3.3 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi dari pada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dalam melakukan pengukuran atas efisiensi penggunaan sumber daya, Balai POM di Mamuju melakukan perhitungan efisiensi capaian output indikator kinerja dan efisiensi pelaksanaan anggaran sesuai kegiatan yang menjadi target dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CapaianOutput}}{\% \text{ CapaianInput}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana Capaianinput}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

1. Analisis Atas Efisiensi Capaian Output Indikator Kinerja

Dalam analisis ini dilakukan perhitungan tingkat efisiensi yang dihitung dengan membandingkan capaian output indikator kinerja dan input penggunaan dana. Tabel di bawah ini merupakan tabel pengukuran efisiensi atas penggunaan sumber daya yang disajikan perindikator dan per sasaran kegiatan.

Tabel 18. Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Indikator Kinerja Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN		IE	SE	TE	KRITERIA
	OUTPUT	INPUT				
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	73.03	98.71	0.74	1.00	-0.26	TIDAK EFISIEN
Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	96.17	99.16	0.97	1.00	-0.03	TIDAK EFISIEN
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	78.32	99.16	0.79	1.00	-0.21	TIDAK EFISIEN
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	106.10	99.16	1.07	1.00	0.07	EFISIEN
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	87.85	99.16	0.89	1.00	-0.11	TIDAK EFISIEN
Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	98.04	98.82	0.99	1.00	-0.01	TIDAK EFISIEN
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	111.54	87.48	1.28	1.00	0.28	EFISIEN
Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	87.48	1.14	1.00	0.14	EFISIEN
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	107.43	91.50	1.17	1.00	0.17	EFISIEN
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	100.00	87.33	1.15	1.00	0.15	EFISIEN
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	73.89	91.95	0.80	1.00	-0.20	TIDAK EFISIEN
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50.00	85.92	0.58	1.00	-0.42	TIDAK EFISIEN

INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN		IE	SE	TE	KRITERIA
	OUTPUT	INPUT				
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	117.65	88.52	1.33	1.00	0.33	EFISIEN
Rasio tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	74.07	86.46	0.86	1.00	-0.14	TIDAK EFISIEN
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50.00	68.54	0.73	1.00	-0.27	TIDAK EFISIEN
Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	86.57	99.41	0.87	1.00	-0.13	TIDAK EFISIEN

Sumber: Monev 2019 Diolah Penyusun, 2020

Pada tahun 2019 Balai POM di Mamuju melaksanakan 16 Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada tabel diatas. Dari 16 Indikator Kinerja, Nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang diperoleh yaitu -0,42 s/d 0,33, dalam hal ini rentang Nilai TE 0 sampai dengan 1,0 memiliki kategori efisien. Indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat memiliki nilai TE yang tertinggi yaitu sebesar 0,33 karena realisasi output paling tinggi yaitu 117,65% dengan input hanya sebesar 88,52%. Indikator ini memiliki nilai TE tinggi karena capaian pada indikator ini sebesar 100% sedangkan target sebesar 85%. Sedangkan penggunaan dananya lebih rendah yaitu sebesar 88,52%. Nilai TE terendah yaitu pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju. Nilai TENya rendah dikarenakan dari total sarana distribusi yang menjadi target dilakukan pengawasan tahun 2019 hanya 25% sarana distribusi Obat yang mendapatkan kriteria Memenuhi Ketentuan (MK) terutama sarana Apotik karena dari 51 sarana yang diperiksa hanya 7 sarana yang MK.

Jika dilihat dari kriterianya, dari 16 Indikator Kinerja yang mendapatkan kriteria “Efisien” hanya sebanyak 6 Indikator. 10 Indikator Kinerja yang masuk kategori “Tidak Efisien” sebagian besar disebabkan karena adanya perubahan terkait kategori produk Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat (MS) yang tidak hanya berdasarkan hasil uji, namun juga berdasarkan MK/TMKnya dalam penandaan dan pelabelan produk. Kedepannya Balai

POM di Mamuju agar dapat meningkatkan koordinasi dengan BPOM Pusat dan dengan lintas sektor agar capaian indikator kinerja kedepannya dapat lebih optimal.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun dengan sumber daya terbatas Balai POM di Mamuju mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan Sasaran Kegiatan melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pengukuran kegiatan efisiensi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Nilai Efisiensi sasaran kegiatan diperoleh dari nilai rata-rata capaian output indikator kegiatan sebagai berikut :

Tabel 19. Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Sasaran Kegiatan Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja

SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN		IE	SE	TE	KRITERIA
	OUTPUT	INPUT				
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	89.92	99.03	0.91	1.00	-0.09	TIDAK EFISIEN
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	105.77	87.48	1.21	1.00	0.21	EFISIEN
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	107.43	91.50	1.17	1.00	0.17	EFISIEN
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	83.12	88.04	0.94	1.00	-0.06	TIDAK EFISIEN
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50.00	68.54	0.73	1.00	-0.27	TIDAK EFISIEN
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	86.57	99.41	0.87	1.00	-0.13	TIDAK EFISIEN

Sumber: Monev 2019 Diolah Penyusun, 2020

Pada tahun 2019 Balai POM di Mamuju melaksanakan 6 Sasaran Kegiatan. Jika dilihat pada table diatas dari Sasaran 6 kegiatan, Nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang diperoleh yaitu -0,27 s/d 0,21. Dalam hal ini rentang Nilai TE 0 sampai dengan 1,0 memiliki kategori efisien. Sasaran meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju memiliki nilai TE yang tertinggi yaitu sebesar 0,21 karena realisasi output paling tinggi yaitu 105,77% dengan input hanya sebesar 87,48%. Sedangkan sasaran meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju memiliki nilai TE paling rendah yaitu sebesar -0,27 karena output yang diperoleh paling rendah yaitu 50,00% dengan input lebih tinggi sebesar 68,54%. Tingkat efisiensi pada sasaran ini rendah karena keterbatasan SDM terutama Penyidik PNS Balai POM di Mamuju dengan beban kerja yang ada. Perhitungan lebih detail terkait efisiensi terdapat pada lampiran 6.

2. Analisis Atas Efisiensi Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Dalam analisis ini dilakukan perhitungan tingkat efisiensi yang dihitung dengan membandingkan capaian output kegiatan yang tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2019 dan input penggunaan anggaran. Tabel di bawah ini merupakan tabel pengukuran efisiensi atas penggunaan sumber daya yang disajikan perindikator dan per sasaran kegiatan.

Tabel 20. Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran

KODE DAN NAMA OUTPUT	% CAPAIAN		IE	SE	TE	KATEGORI
	INPUT	OUTPUT				
3165.002: Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	64.88	33.33	0.51	1.00	-0.49	TIDAK EFISIEN
3165.003: Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar	88.73	102.00	1.15	1.00	0.15	EFISIEN

KODE DAN NAMA OUTPUT	% CAPAIAN		IE	SE	TE	KATEGORI
	INPUT	OUTPUT				
3165.004: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	91.95	103.45	1.13	1.00	0.13	EFISIEN
3165.005: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	85.92	100.00	1.16	1.00	0.16	EFISIEN
3165.010: Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu	98.76	100.00	1.01	1.00	0.01	EFISIEN
3165.011: Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang Ditangani	83.55	100.00	1.20	1.00	0.20	EFISIEN
3165.012: Layanan Dukungan Laboratorium	96.75	100.00	1.03	1.00	0.03	EFISIEN
3165.081: Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	96.39	100.26	1.04	1.00	0.04	EFISIEN
3165.082: Penyediaan Alat Laboratorium	99.47	118.75	1.19	1.00	0.19	EFISIEN
3165.085: Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	96.71	100.00	1.03	1.00	0.03	EFISIEN
3165.086: Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	86.46	108.11	1.25	1.00	0.25	EFISIEN
3165.087: Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan	88.52	100.00	1.13	1.00	0.13	EFISIEN
3165.088: KIE Obat dan Makanan Aman	87.48	104.35	1.19	1.00	0.19	EFISIEN
3165.089: Desa Pangan Aman	86.04	100.00	1.16	1.00	0.16	EFISIEN
3165.090: Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	81.09	100.00	1.23	1.00	0.23	EFISIEN
3165.951: Layanan Sarana dan Prasarana Internal	99.78	100.00	1.00	1.00	0.00	EFISIEN
3165.994: Layanan Perkantoran	99.48	100.00	1.01	1.00	0.01	EFISIEN

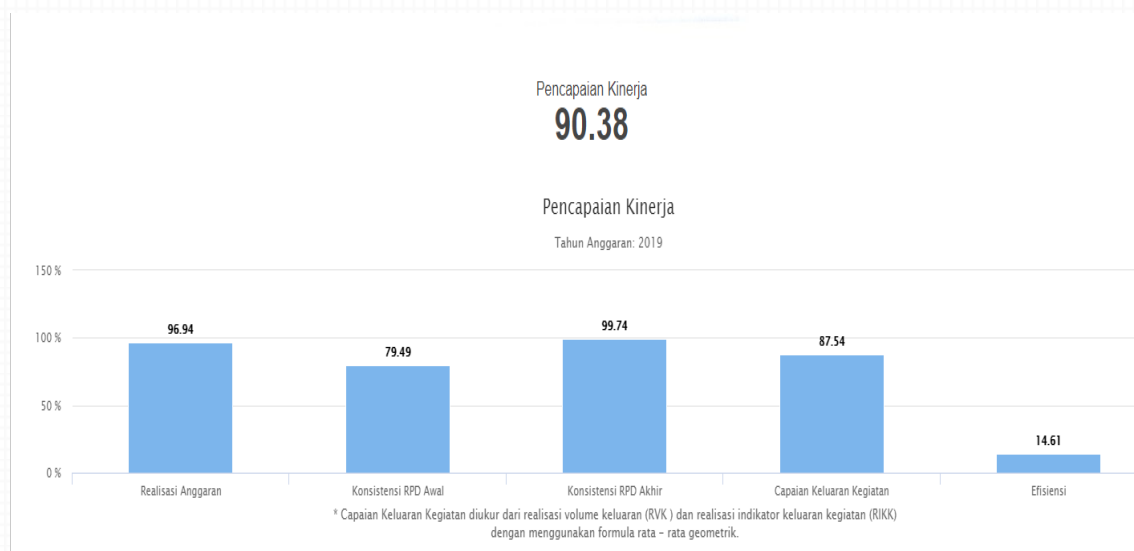
Sumber: Monev SMART DJA 2019 Diolah Penyusun, 2020

Pada Tabel 20 dapat dilihat Tingkat Efisiensi (TE) berdasarkan capaian output dan capaian penyerapan anggaran sesuai dengan target pada DIPA Tahun 2019. Dari 17 Output yang tercantum dalam POK, hanya 1 Output yang mendapat Kategori “Tidak Efisien” yaitu Output Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan. Hal ini dikarenakan capaian output pada output ini lebih kecil dari capaian inputnya kemudian menyebabkan TE yang diperoleh sebesar -0,49 jauh dibawah Standar Efisiensi. Tidak tercapainya target pada output ini dikarenakan masih lebih banyak fokus untuk

menyelesaikan target perkara yang *carry over* tahun sebelumnya. Selain itu terbatasnya SDM PPNS aktif jika dibandingkan beban kerja yang dimiliki Balai POM di Mamuju juga turut berpengaruh terhadap optimalnya capaian output ini. Kedepannya dengan lebih ditingkatnya kompetensi CPNS di Seksi Penindakan diharapkan capaian output ini akan semakin optimal. Perhitungan lebih detail terkait efisiensi terdapat pada lampiran 7.

Jika dilihat dari 2 (dua) analisis efisiensi diatas, yaitu efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian terhadap indikator kinerja dan capaian kinerja pelaksanaan anggaran (berdasarkan target dalam POK) sangat terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Dalam indikator kinerja, terdapat 6 (enam) dari 16 (enam belas) indikator kinerja yang mendapat kriteria “Efisien” sedangkan jika dilihat berdasarkan capaian pelaksanaan anggaran terdapat 16 (satu) dari 17 Ouput Kegiatan yang mendapatkan kritertria “Efisien”. Banyaknya indikator kinerja yang tidak efisien sebagian besar disebabkan adanya perubahan ketentuan dalam pengkategorian produk MS/TMS selain pencapaian indikator yang sangat bergantung pada lintas sektor terkait seperti Kejaksaan Tinggi.

Pada gambar berikut ini disajikan Pencapaian Kinerja Berdasarkan Aplikasi Monev SMART DJA Kementerian Keuangan Tahun 2019.



Gambar 26. Pencapaian Kinerja Balai POM di Mamuju
Sumber: Aplikasi SMART DJA, 20 Februari 2020

Berdasarkan aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id diperoleh nilai kinerja Balai POM di Mamuju pada tahun 2019 sebesar 90,38% atau kategori Baik. Nilai kinerja pada aplikasi monev ini diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Lalu dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar. Semua perhitungan tersebut dilakukan sesuai PMK No.214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Adapun komponen dari pencapaian kinerja tersebut terdiri atas realisasi anggaran sebesar 96,94%, konsistensi RPD awal 79,49%, konsistensi RPD akhir 99,74%, Capaian Keluaran Kegiatan (CKK) sebesar 87,54% dan Efisiensi sebesar 14,61%. Pada komponen CKK dan Realisasi Anggaran tidak mencapai 100% disebabkan oleh adanya beberapa output yang belum tercapai 100%.

IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Balai POM di Mamuju sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja. Sebagai bentuk perwujudan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Mamuju kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja juga merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Balai POM di Mamuju telah berhasil mencapai target 2 Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria BAIK yaitu:

- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju
- Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Mamuju

Hal ini menunjukkan keberhasilan Balai POM di Mamuju dalam memberdayakan masyarakat baik masyarakat pada umumnya maupun pelaku usaha di bidang obat dan makanan; sesuai dengan salah satu misi BPOM mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

Adapun target sasaran lainnya masih dalam kriteria CUKUP dan KURANG, oleh karena itu Balai POM di Mamuju harus lebih berupaya memperbaiki kinerja demi mencapai target yang diberikan.

- Realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 16.514.582.388,- atau 96,94%. Terjadi kenaikan realisasi anggaran dibandingkan tahun 2018 dengan realisasi sebesar 83,41%.
- Berdasarkan perhitungan efisiensi sasaran, dari 6 (enam) sasaran terdapat 5 (lima) sasaran yang efisien dan 1 (satu) sasaran yang tidak

efisien. Efisiensi paling tinggi terdapat pada Sasaran Kegiatan ke dua yaitu “Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju”, sedangkan efisiensi paling rendah terdapat pada sasaran ke lima yaitu “Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju.”

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Balai POM di Mamuju terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan, dengan peningkatan kinerja dan kompetensi SDM serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

4.2 SARAN

Sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki capaian kinerja Balai POM di Mamuju perlu dilakukan beberapa upaya antara lain

1. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap strategi pencapaian indikator kinerja Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Mamuju.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya Balai POM di Mamuju baik dari segi SDM, Penganggaran dan infrastruktur;
3. Meningkatkan cakupan pengawasan dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait baik ditingkat propinsi maupun ditingkat kabupaten yang ada di wilayah kerja Balai POM di Mamuju;
4. Meningkatkan pelayanan publik Balai POM di Mamuju dengan melakukan perbaikan sistem pelayanan registrasi untuk efisiensi layanan publik;
5. Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan baik untuk *premarket evaluation* maupun *postmarket surveilan*;
6. Untuk meningkatkan sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang optimal di perlukan dukungan sumber daya dan dana yang cukup, serta sarana dan prasarana yang memadai.

IV. LAMPIRAN

1. Iktisar Rencana Strategis 2017-2019

² Tahun 2017 – 2018 (OTK Lama)

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja	
		2017	2018
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	93
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80	83
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	88	92
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	78	80
	Persentase Pangan yang memenuhi syarat	80	83
	Tingkat Kepuasan Masyarakat	60	65
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan Komitmen untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan	2	4
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM	Nilai SAKIP Balai POM di Mamuju dari Badan POM	A	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
Meningkatnya Kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	513	513
	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100	100
Meningkatnya Kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	7,41	7,41
Meningkatnya Kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	13,77	13,77
Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	1,00	3,00

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja	
		2017	2018
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	19	19
	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	2	4
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Mamuju			
Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	30	30
Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	9

Tahun 2019 (OTK Baru)

Sasaran Strategi	Indikator	2019
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	71
	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	94
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	84
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	87
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	93
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	80
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	61
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	66

Sasaran Strategi	Indikator	2019
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	61
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	50
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	60
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	50
Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BB/BPOM	81

2. Rencana Kerja Tahunan 2019



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. DR. Ratulangi No. 4 Mamuju 91551 Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpommamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU NOMOR : HK.04.03.122.09.18.786

TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2019 KEPALA BALAI POM DI MAMUJU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Nomor HK.04.03.122.09.18.780 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. DR. Ratulangi No. 4 Mamuju 91551 Sulawesi Barat, Telp. (0428) 2322759

Email : bpommamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2019;
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2019;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 5 Desember 2018

Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Mamuju,



Dra. Netty Nurmuliawaty, Apt., M.Kes

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju
Nomor : HK.04.01122.04.36.980 Tentang Rencana Kerja Balai Pengawas Obat
dan Makanan di Mamuju Tahun 2019

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
TAHUN 2019**

NO.	KELAHIRAN STRATEGIS/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	Penertiban Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	75,00
		Penertiban Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	94,00
		Penertiban Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	94,00
		Penertiban Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	93,00
		Penertiban Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	95,00
		Penertiban Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	80,00
2	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	81,00 86,00
3	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	81,00
4	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju Persentase kepatuhan penyalur vertikal yang dilaksanakan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	100,00 42,00 50,00 85,00
		Balai melakukan hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	85,00
5	Meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00
6	Memperkuat Referensi Risiko (RRM) sesuai roadmap Referensi Risiko (RRM) 2018-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Nilai AVER Balai POM di Mamuju	8,00

Mamuju, 05/03/2019
Kepala Balai POM di Mamuju

Dr. Nelly Hermawati, Apt., M.Kes.

3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Mamuju



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra Netty Nurmuliawaty, Apt., M. Kes.

Jabatan : Kepala Balai POM di Mamuju Selanjutnya selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 04 Januari 2019

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Pihak Pertama,

Dra. Netty Nurmuliawaty, Apt. M. Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	71,00
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	94,00
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	84,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	87,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	93,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	80,00
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	81,00
		Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	86,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	81,00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	42,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	85,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80,00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00
6	Terwujudnya RB Balai POM di Mamuju sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	81,00

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp. 16.107.426.000,-

Pihak Kedua
Kepala Badan POM


Dr. Ir. Perry K. Lukito, M.C.P

Mamuju, 04 Januari 2019

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Mamuju


Dra. Nelly Hamuliawaty, Apt., M.Kes

4. Pengukuran Capaian Input dan Output Berdasarkan Capaian Kegiatan

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Input: Dana	1.004.617.310	991.707.160	98,71
	Output:	140,50	143,00	101,78
	Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar	150,00	153,00	102,00
	Layanan Dukungan Laboratorium	1,00	1,00	100,00
	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	379,00	380,00	100,26
	Penyediaan Alat Laboratorium	32,00	38,00	118,75
Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	Input: Dana	961.467.976	953.421.940	99,16
	Output:	137,33	139,67	101,70
	Layanan Dukungan Laboratorium	1,00	1,00	100,00
	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	379,00	380,00	100,26
	Penyediaan Alat Laboratorium	32,00	38,00	118,75
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	Input: Dana	961.467.976	953.421.940	99,16
	Output:	137,33	139,67	101,70
	Layanan Dukungan Laboratorium	1,00	1,00	100,00
	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	379,00	380,00	100,26
	Penyediaan Alat Laboratorium	32,00	38,00	118,75
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	Input: Dana	961.467.976	953.421.940	99,16
	Output:	137,33	139,67	101,70

	Layanan Dukungan Laboratorium	1,00	1,00	100,00
	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	379,00	380,00	100,26
	Penyediaan Alat Laboratorium	32,00	38,00	118,75
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	Input: Dana	961.467.976	953.421.940	99,16
	Output:	137,33	139,67	101,70
	Layanan Dukungan Laboratorium	1,00	1,00	100,00
	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	379,00	380,00	100,26
	Penyediaan Alat Laboratorium	32,00	38,00	118,75
Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	Input: Dana	961.467.976	953.421.940	99,16
	Output:	137,33	139,67	101,70
	Layanan Dukungan Laboratorium	1,00	1,00	100,00
	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	379,00	380,00	100,26
	Penyediaan Alat Laboratorium	32,00	38,00	118,75
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Input: Dana	247.516.000	216.522.980	87,48
	Output: KIE Obat dan Makanan Aman	23,00	24,00	104,35
Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Input: Dana	247.516.000	216.522.980	87,48
	Output: KIE Obat dan Makanan Aman	23,00	24,00	104,35
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat	Input: Dana	1.791.031.000	1.638.798.349	91,50
	Output:	78,00	78,25	101,09

dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	284,00	284,00	100,00
	KIE Obat dan Makanan Aman	23,00	24,00	104,35
	Desa Pangan Aman	4,00	4,00	100,00
	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1,00	1,00	100,00
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	Input: Dana	396.611.500	346.345.244	87,33
	Output:	236,67	238,00	100,75
	Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar	150,00	153,00	102,00
	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	181,00	181,00	100,00
	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	379,00	380,00	100,26
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Input: Dana	110.892.000	101.963.090	91,95
	Output:			
	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	29,00	30,00	103,45
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Input: Dana	311.864.000	267.965.135	85,92
	Output:			
	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	181,00	181,00	100,00
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	Input: Dana	47.974.000	42.465.500	88,52
	Output:			
	Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan	6,00	6,00	100,00
Rasio tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Input: Dana	151.800.000	131.252.600	86,46
	Output:			
	Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	37,00	40,00	108,11

Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Input: Dana	240.173.000	164.620.099	68,54
	Output:	2,00	2,00	50,00
	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	3,00	1,00	33,33
	Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang Ditangani	1,00	1,00	100,00
Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	Input: Dana	7.676.668.143	7.631.119.219	99,41
	Output:	13,75	15,25	110,91
	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu	10,00	10,00	100,00
	Penyediaan Alat Laboratorium	32,00	38,00	118,75
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	1,00	100,00
	Layanan Perkantoran	12,00	12,00	100,00

5. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Fisik dan Anggaran Balai POM di Mamuju

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FISIK				ANGGARAN			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NPS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NPS
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	71,00	51,85	73,03		1.004.617.310	991.707.160	98,71	
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	94,00	90,40	96,17		961.467.976	953.421.940	99,16	
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	84,00	65,79	78,32		961.467.976	953.421.940	99,16	
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	87,00	92,31	106,10	89,92	961.467.976	953.421.940	99,16	99,03
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	93,00	81,70	87,85		961.467.976	953.421.940	99,16	
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	80,00	78,43	98,04		963.019.143	951.612.272	98,82	
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	61,00	68,04	111,54		247.516.000	216.522.980	87,48	
		Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	66,00	66,00	100,00	105,77	247.516.000	216.522.980	87,48	87,48
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	61,00	65,53	107,43	107,43	1.791.031.000	1.638.798.349	91,50	91,50

4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	100,00	100,00	100,00		396.611.500	346.345.244	87,33
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	42,00	31,03	73,89		110.892.000	101.963.090	91,95
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00	25,00	50,00	83,12	311.864.000	267.965.135	85,92
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	85,00	100,00	117,65		47.974.000	42.465.500	88,52
		Rasio tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	60,00	44,44	74,07		151.800.000	131.252.600	86,46
									88,04
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50,00	25,00	50,00	50,00	240.173.000	164.620.099	68,54
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	81,00	70,12	86,57	86,57	7.676.668.143	7.631.119.219	99,41
									99,41

6. Pengukuran Efisiensi Balai POM di Mamuju Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FISIK (OUTPUT)		ANGGARAN (INPUT)		IE	SE	TE	KRITERIA	IE	SE	TE	KRITERIA
			IKSK	SK	IKSK	SK								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sulawesi Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	73.03		98.71		0.74	1.00	-0.26	TIDAK EFISIEN				
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	96.17		99.16		0.97	1.00	-0.03	TIDAK EFISIEN				
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	78.32		99.16		0.79	1.00	-0.21	TIDAK EFISIEN				
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	106.10	89.92	99.16	99.03	1.07	1.00	0.07	EFISIEN	0.91	1.00	-0.09	TIDAK EFISIEN
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	87.85		99.16		0.89	1.00	-0.11	TIDAK EFISIEN				
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Barat	98.04		98.82		0.99	1.00	-0.01	TIDAK EFISIEN				
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	111.54		87.48		1.28	1.00	0.28	EFISIEN				
		Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	105.77	87.48		1.14	1.00	0.14	EFISIEN	1.21	1.00	0.21	EFISIEN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FISIK (OUTPUT)		ANGGARAN (INPUT)		IE	SE	TE	KRITERIA	IE	SE	TE	KRITERIA
			IKSK	SK	IKSK	SK								
	Balai POM di Mamuju													
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	107.43	107.43	91.50	91.50	1.17	1.00	0.17	EFISIEN	1.17	1.00	0.17	EFISIEN
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sulawesi Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sulawesi Barat	100.00		87.33		1.15	1.00	0.15	EFISIEN				
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	73.89		91.95		0.80	1.00	-0.20	TIDAK EFISIEN				
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50.00	83.12	85.92	88.04	0.58	1.00	-0.42	TIDAK EFISIEN	0.94	1.00	-0.06	TIDAK EFISIEN
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Barat	117.65		88.52		1.33	1.00	0.33	EFISIEN				
		Rasio tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM	74.07		86.46		0.86	1.00	-0.14	TIDAK EFISIEN				

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FISIK (OUTPUT)		ANGGARAN (INPUT)		IE	SE	TE	KRITERIA	IE	SE	TE	KRITERIA
			IKSK	SK	IKSK	SK								
		di Mamuju												
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja B alai POM di Mamuju	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	50.00	50.00	68.54	68.54	0.73	1.00	-0.27	TIDAK EFISIEN	0.73	1.00	-0.27	TIDAK EFISIEN
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	86.57	86.57	99.41	99.41	0.87	1.00	-0.13	TIDAK EFISIEN	0.87	1.00	-0.13	TIDAK EFISIEN

7. Pengukuran Efisiensi Balai POM di Mamuju Berdasarkan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

KODE DAN NAMA OUTPUT	TARGET	REALISASI	% INPUT	TARGET	REALISASI	% OUTPUT	IE	SE	TE	KATEGORI
3165.002: Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	193,106,000	125,296,296	64.88	3	1	33.33	0.51	1.00	-0.49	TIDAK EFISIEN
3165.003: Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar	129,448,000	114,855,660	88.73	150	153	102.00	1.15	1.00	0.15	EFISIEN
3165.004: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	110,892,000	101,963,090	91.95	29	30	103.45	1.13	1.00	0.13	EFISIEN
3165.005: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	623,728,000	535,930,270	85.92	181	181	100.00	1.16	1.00	0.16	EFISIEN
3165.010: Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu	1,341,433,000	1,324,737,312	98.76	10	10	100.00	1.01	1.00	0.01	EFISIEN
3165.011: Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang Ditangani	47,067,000	39,323,803	83.55	1	1	100.00	1.20	1.00	0.20	EFISIEN
3165.012: Layanan Dukungan Laboratorium	371,404,000	359,317,500	96.75	1	1	100.00	1.03	1.00	0.03	EFISIEN

KODE DAN NAMA OUTPUT	TARGET	REALISASI	% INPUT	TARGET	REALISASI	% OUTPUT	IE	SE	TE	KATEGORI
3165.081: Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	249,589,000	240,569,332	96.39	379	380	100.26	1.04	1.00	0.04	EFISIEN
3165.082: Penyediaan Alat Laboratorium	6,005,784,000	5,974,085,612	99.47	32	38	118.75	1.19	1.00	0.19	EFISIEN
3165.085: Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	990,021,000	957,405,457	96.71	284	284	100.00	1.03	1.00	0.03	EFISIEN
3165.086: Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	151,800,000	131,252,600	86.46	37	40	108.11	1.25	1.00	0.25	EFISIEN
3165.087: Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan	47,974,000	42,465,500	88.52	6	6	100.00	1.13	1.00	0.13	EFISIEN
3165.088: KIE Obat dan Makanan Aman	742,548,000	649,568,939	87.48	23	24	104.35	1.19	1.00	0.19	EFISIEN
3165.089: Desa Pangan Aman	324,179,000	278,908,362	86.04	4	4	100.00	1.16	1.00	0.16	EFISIEN
3165.090: Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	229,315,000	185,961,550	81.09	1	1	100.00	1.23	1.00	0.23	EFISIEN
3165.951: Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,383,259,000	1,380,224,649	99.78	1	1	100.00	1.00	1.00	0.00	EFISIEN

KODE DAN NAMA OUTPUT	TARGET	REALISASI	% INPUT	TARGET	REALISASI	% OUTPUT	IE	SE	TE	KATEGORI
3165.994: Layanan Perkantoran	4,094,007,000	4,072,716,456	99.48	12	12	100.00	1.01	1.00	0.01	EFISIEN



BALAI POM DI MAMUJU

📍 Jl. Poros Mamuju – Kalukku, KM. 13 Bambu, Kab. Mamuju – Sulawesi Barat

☎ Telp. (0426) 2322759

✉ bpom_mamuju@pom.go.id, bpommamuju@gmail.com ,
ulpkmamuju@gmail.com